



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
Disingkat PT WIKA BETON Tbk

Tanggal : 30 Mei 2024
Nomor: 75.-
(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090
e-mail : nanettechnot@gmail.com
e-mail : poerbaningsih@yahoo.com



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0148744
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Kepada Yth.
Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI
WARSITO.,SH .
JL. PANGLIMA POLIM V NO. 11
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 75 Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 19 Juni 2024, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 9, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, **PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKA BETON TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120151.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 Juni 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0215256
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Kepada Yth.
Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI
WARSITO.,SH
JL. PANGLIMA POLIM V NO. 11
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 75 Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Ganti Nama Pemegang Saham, **PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKABETON TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120151.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 Juni 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

~~Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH~~



PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
disingkat PT WIKA BETON Tbk.



-Nomor : 75.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat). -----

-Jam 09.25 (sembilan lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,-----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

Bapak KUNTJARA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 (empat Oktober ---
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama--
dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Raffles Hills ----
Blok B. 2 Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan -----
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat; -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374110410700005.-----

- Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, atas-----
kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 17-05-2024-
(tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat) dengan demikian mewakili -----
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk -----
selanjutnya disebut “Perseroan”), yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya -----
dimuat dalam Akta tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari tahun dua ribu empat----
belas) Nomor 03 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2014 (sembilan-----



Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. ----
Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta ---
akta tertanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 09, --
dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusannya tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) -
nomor: AHU-0032467.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan pemberitahuan-----
perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal ----
10-06-2023 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0075858.-----
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta-----
tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 17,-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei tahun--
dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.09-0117313.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:
bahwa pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat),-----
berada di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").-----
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
17-05-2024 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : 43. -----
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir--
baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui online e.ASY.KSEI,-----
berjumlah 5.916.014.049 (lima miliar sembilan ratus enam belas juta empat belas ribu----
empat puluh sembilan) saham atau mewakili 67,88% (enam puluh tujuh koma delapan ---
delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan/ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah-----



8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ---
ribu enam ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan,-----
karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. -----
-bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui : -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ---
keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris---
dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, pelaporan---
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap -----
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan-----
tersebut antara lain telah memutuskan : -----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar-----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;-----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur---
lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan -----
berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan -----
menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan ---
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,-----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan -----
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan-
oleh instansi yang berwenang. -----



Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengubah beberapa pasal dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian pemegang saham, namun untuk -----
mempermudah pembacaan maka Anggaran Dasar Perseroan disusun kembali menjadi ----
berbunyi sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
PT Wijaya Karya Beton Tbk, disingkat PT WIKA Beton Tbk (selanjutnya dalam ----
Anggaran Dasar ini cukup disingkat Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat --
di Jakarta Timur.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor perwakilan atau satuan ----
usaha lainnya di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 11-03-1997 (sebelas Maret seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh tujuh) dan telah memperoleh pengesahan tanggal 09-12-1997-----
(sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: -----
C2-12776.HT.01.01.TH.97, serta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang
usaha lain yang terkait. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan-
kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
 - a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan-
Konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain : -----



- 1) Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi [23953] -----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan ----
atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, ---
bata/dinding, pipa beton dan beton pratekan, papan, lembaran, panel, --
tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung ---
atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-
tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang -----
disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya. -----
- 2) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang [43901]-----
Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang---
pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk ----
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan ----
lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang -----
tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya.-----
- 3) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung [30112] -----
Mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai ----
dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya,-----
seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman -----
untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok
terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam,
bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform-
dan morning buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, ---
tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk-----
rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali -----
hovercraft jenis rekreasi. -----
- 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46638] -----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material -----
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.-----
- 5) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api -----



[23911] -----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar-----
tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang-----
tahan api, seperti alumina, silica dan basic-----

- b. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha: -----
1) Sipil; -----
2) Elektrikal; -----
3) Postensioning.-----
- c. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/komponen bahan bangunan. -----
- d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan tersebut ----- pada huruf a, b, dan c di atas. -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat --- melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ----- sumber daya yang dimiliki untuk: -----

- a. Melakukan Usaha Industri dan Perdagangan Bahan Produksi Beton: -----
1) Batu Hias dan Batu Bangunan [08101] -----
Mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu-pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, ----- obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya. -----
- 2) Penggalian Kerikil (sirtu) [08103] -----
Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. ----- Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil. -----
- 3) Penggalian Pasir [08104] -----
Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil-dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit ----- mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan-----



- lainnya. -----
- 4) Penggalian tanah dan tanah liat [08105]-----
- Mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan-----
pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat-----
dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah-
liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan -
tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing-----
clay), abu bumi, serpih dan tanah urug. -----
- 5) Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya [08109] -----
- Mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya.-----
- 6) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya [09900] --
- Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau -----
kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan-----
pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara-----
tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi -----
geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa -----
percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. ---
- 7) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api.-----
- [23911] -----
- Mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar-----
tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang-----
tahan api, seperti alumina, silica dan basic. -----
- 8) Industri Semen [23941]-----
- Mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik---
dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen-----
mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis
semen lainnya.-----
- 9) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai [23957]-----
- Mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready-----
mixed and dry mixed concrete and mortar).-----



- 10) Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga,-----
Pajangan, Dan Bahan Bangunan [23963]-----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk----
keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti batu--
pecah-pecahan dan abu batu.-----
- 11) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan mobil, sepeda-----
motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya [46593]-----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi --
darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor ---
dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam ----
suku cadang dan perlengkapannya. -----
- 12) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [46100]-
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), ---
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan -----
barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.-----
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh -----
perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan ---
pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian-----
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk ---
melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti ----
bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang --
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, ---
termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, --
bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan -----
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan -
perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen--
komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk-----
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan -----
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam -----



- golongan 451 s.d. 454. -----
- 13) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu [46634] -----
Mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu-----
untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland-
abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, --
kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu-----
lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. -----
- 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46638] -----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material -----
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. -----
- 15) Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam [46641] -----
Mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti-----
intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium,-
brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit,-
oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, -----
dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu
kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen. -----
- 16) Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi [47521] -
Mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk -----
bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja
lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut,---
engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling -----
door, awning dan seng lembaran. -----
- 17) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu [47524]-----
Mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan--
batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen -----
portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, -----
kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, ---
batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. -----
- b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan -----



Konstruksi dalam bidang usaha:-----

1) Konstruksi Gedung Hunian [41011]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal,-- rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium.- Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh--- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan----- perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

2) Konstruksi Gedung Industri [41013]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung----- perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan----- pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk---- kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.-----

3) Konstruksi Gedung Kesehatan [41015]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan ----- kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan --- dan renovasi gedung kesehatan.-----

4) Konstruksi Gedung Pendidikan [41016]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti----- gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi----- gedung pendidikan.-----

5) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga [41018]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti----- bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi----



serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan----- untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat----- hiburan dan olahraga.-----

6) Konstruksi Gedung Lainnya [41019]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok--- 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa-- (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah---- pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung----- PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah,-- gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset,----- rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik,----- gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk--- penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan----- perubahan dan renovasi gedung lainnya-----

7) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung [41020]----

Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti--- beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya-- dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk----- bangunan gedung.-----

8) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan [42101]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas----- hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan----- parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard).----- Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan,----- pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.-----



- 9) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan-----
Underpass [42102]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel),---
jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan-----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan--
perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok-----
penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.-----
- 10) Konstruksi Jalan Rel [42103]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk-----
pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan----
kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.-----
- 11) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase [42201]-----
Mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.---
- 12) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih [42202]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan-----
pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan-----
Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur-----
distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air----
minum lainnya.-----
- 13) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan-
Limbah Padat, Cair dan Gas [42203]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan-
Kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan-----
pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan-----
Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur-----
distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air----



minum lainnya.-----

14) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal [42204]-----

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil
pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga-----
listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk-----
pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.--

15) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana-----

Transportasi [42205]-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan,-----
dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi-----
sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara,--
bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan---
menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya.-----

16) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya [42209]

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan-
Kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam-----
kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan dan lingkungan,-----
prasarana Kawasan pemukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain.----

17) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga [42918]-----

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau-----
pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan--
stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap
mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan--
golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja-----
galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan--
panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.-----

18) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42919]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan-----
bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911--



s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman-
(di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan---
dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana-----
umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti---
yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer,-----
mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan-----
pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan
dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.-----

19) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai [42922]-----

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan Kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin,---
breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu--
buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.-----

20) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia,-----

Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya [42923]-----
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan Kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar;-----
pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet;-----
pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya-----
termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.-----

21) Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42929]-----

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang
belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d. 42924.-----

22) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil [42930]-----

Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti---
beton pracetak, baja, plastik, karet dan hasil produksi pabrik lainnya---
dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan-



sipil.-----

23) Penyiapan Lahan [43120]-----

Mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang-----
berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan ---
konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi --
tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan-
konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau-----
peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah -----
dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan ---
tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, -----
sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan -----
jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, --
transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, -
serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, -----
pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor,--
pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan
contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan--
sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. -----
Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat-
bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan ----
gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor,
basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, -
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan---
jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi,----
dan pekerjaan sejenis lainnya. -----

24) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis [71102]-----

Mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti-----
permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan -----
teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan -----



konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan -----
gedung hunian dan non hunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil ----
sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam -----
bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultansi -
teknik lingkungan, jasa konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem
kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan-----
transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa--
untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa--
lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan -----
teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia,-----
mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; -----
proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa -----
penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan ----
perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan --
teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan-----
survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi -----
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan -
geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan
survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di -
bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi-
termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa -
rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis -----
prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.-----

25) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa [72102] -----

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara
teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan -----
dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup-
dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik-
dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu-----
pengetahuan alam dan teknik. -----



- c. Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/Pemasangan Mesin dan -----
Peralatan Konstruksi, seperti:-----
- 1) Instalasi Telekomunikasi [43212]-----
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada -----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti -----
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan -----
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi ----
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang-----
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk-----
kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan-----
Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.-----
 - 2) Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara [43214] ---
Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan -----
peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, -
telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, ---
alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan -----
pelayaran dan penerbangan.-----
 - 3) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api [43215]-----
Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan ---
instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. -----
 - 4) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya [43216]-----
Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi
sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan -----
perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka -----
jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok --
pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median---
beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis. -----
 - 5) Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl [43299] -----
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil-----



lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. -----
Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas -----
pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging -----
stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast-----
furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan -
peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni ----
pada pembangkit listrik.-----

6) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang [43901]-----

Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang----
pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk----
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan -----
lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang-----
tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya-----

7) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator [43905] -----

Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan-----
perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi
dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi-----
seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan-----
penyewaan derek. -----

8) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl [43909]-----

Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum -----
diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan -
keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan-----
penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft
sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri
dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan--
perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung --
yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, -----
pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; -----



pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan---
injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan-----
konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi-----
kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang
sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, -
incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya.-----

9) Jasa Pengujian Laboratorium [71202]-----

Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan-
analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup -
kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji-----
penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi-----
makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian --
mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material ----
seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji ---
kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti ---
motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat-----
telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain----
lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan-----
seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau -----
maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain.-----
Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian
kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.-----

10) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi [71204]-----

Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses-----
instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi ---
lainnya.-----

d. Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa Dalam Bidang Peralatan-
Konstruksi, seperti:-----

1) Pemasangan Perancah (Steiger) [43902]-----



- Mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada -----
bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan----
sejenisnya.-----
- 2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan
Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil [77393]-----
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ----
(operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil ----
termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek -----
(cranelorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work -----
platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan -----
sejenisnya.-----
- e. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, ----
Sewa Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/Usaha Angkutan Darat dan
Laut, seperti:-----
- 1) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum [49431]-----
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor---
dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan ---
dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). -----
- 2) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus [49432]-----
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor---
untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, -----
seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, -----
LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan -----
berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti-
kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan -----
pengangkutan kendaraan bermotor.-----
- 3) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum [50131] -----
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan ----
menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan -----
melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau-



- trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha-----
persewaan angkutan laut berikut operatornya. -----
- 4) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus [50133]-----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan -----
menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk-----
mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang-----
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak,
minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya.
Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. -----
- 5) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan ----
[50221] -----
Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang----
yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, ----
barang khusus atau alat berat.-----
- 6) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus [50222]-----
Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal---
atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya -----
mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi-----
persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang-----
diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu----
gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang --
curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan -----
fasilitas pendingin, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan--
angkutan barang khusus lainnya.-----
- 7) Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi untuk Barang-----
[50224] -----
Mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain---
dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
- 8) Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang-----
[50225] -----



Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat ---- dan teluk antar provinsi untuk barang yang menghubungkan daerah ---- daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum ----- berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara ----- komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha-- persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. -----

9) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut [52221] -----

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang ----- berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan ---- dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo ----- dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan ----- berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. -----

10) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan [52223] -----

Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan ----- untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas - terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan ----- barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), - pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan ---- dan penundaan. -----

11) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [52291] -----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam ----- volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan -- laut maupun angkutan udara -----

12) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) [52292] -----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam -----



volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat-----
angkutan darat.-----

13) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) [52293] -----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam -----
volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.-----

f. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya [38220] -----

Mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh-----
pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau
limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan ---
mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar,-----
bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat -----
menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya ----
untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha-----
pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah ---
spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun--
dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, -----
treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti-----
treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan---
pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan --
treatment lainnya terhadap limbah radioaktif. -----

g. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [68111] -----

Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real ---
estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen,
bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat-
pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan-----
lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa --
perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau-----
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk --
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di Gedung tersebut),----
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan --



pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-----
pindah. -----

h. Aktivitas Kantor Pusat [70100]-----

Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau -
enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan-
keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam -----
kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi-
unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini ----
antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan ----
hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. ----

i. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi-----

Rekayasa Lainnya [72109] -----

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur
(sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi --
dan rekayasa (engineering) lainnya. -----

j. Penelitian Pasar [73201] -----

Mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, -----
kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi -----
penjualan dan pengembangan produk baru. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.668.000.000.000,- (dua triliun enam ratus ---
enam puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 26.680.000.000 (dua puluh enam ---
miliar enam ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 8.715.466.600 ---
(delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam --
ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp871.546.660.000,- (delapan ratus -
tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ----
ribu Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----



- Pemegang Saham Perseroan. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan --- disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran-- lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 33 tanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -- yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-08-2020 (tujuh----- Agustus tahun dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0129568.AH.01.11.; -----
 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut --- keperluan modal Perseroan pada waktu, tata cara, harga, dan persyaratan yang----- ditetapkan oleh Rapat Direksi untuk selanjutnya wajib memperoleh persetujuan ----- Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). RUPS dapat mendelegasikan ----- kewenangan mengenai pelaksanaannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris,----- dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan di----- bidang Pasar Modal. -----
 5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain --- selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi ----- peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai----- penyetoran tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya --- penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum. -----
 6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dengan ketentuan sebagai ----- berikut :-----
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada ---- publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang -----



- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut --
"OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk --
saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar. -----
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih --
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba ----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ----
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ----
yang terdaftar di OJK. -----
- f. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang -----
dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat ---
dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. -----
- g. Dalam hal penyeteroran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib -----
disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 dan -
Pasal 74 UUPT dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan --
dan yang lain beredar nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal RUPS mengenai penyeteroran tersebut. -----
7. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau --
Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang ---
memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek ----
Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), yang merupakan suatu hak yang --
dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu -----
terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dan wajib mengumumkan informasi ----
mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada -----
pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui -----
paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional --



- atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-----
prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.-----
8. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat -----
ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika -----
Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau -----
Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:-----
- a. Perbaikan posisi keuangan;-----
 - b. Selain perbaikan posisi keuangan; -----
 - c. penerbitan Saham Bonus yang: -----
 - 1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau-----
 - 2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau -----
unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-----
9. a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, penyetoran atas -----
saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.-----
- b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib-----
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- 1) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;-----
 - 2) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain
uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi -----
penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - 3) Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.-----
- c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang -----
dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat ---
dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.-----
10. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ; -----
- Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat -
Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit),-----
dilakukan dengan : -----



- a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan ----- kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau - efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang-- memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.---
- b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD----- dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
- c. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh----- saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu ----- yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
- d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----- lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua ----- pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham---- dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD ----- dimaksud. -----
- e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan ----- mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan---- yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
- f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian --- oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam - hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan----- kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan---- syarat-syarat yang sama. -----
- g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan ----- dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah --- ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga ---- yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas --- lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. -----



- h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan -----
saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak --
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan -----
HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
- 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi ---
menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau--
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui RUPS; dan/atau -----
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang-----
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal -----
ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh --
lima persen) dapat dilakukan sepanjang :-----
- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambahkan modal dasar; -----
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut -
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - c. Penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% ----
(dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu ---
paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud -
pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia;-----
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat---
ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali -----
Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;-----
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a -----



termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam---
huruf d ayat ini. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan -----
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan. -----
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari--
1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai -----
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ---
secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka -----
bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya--
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang
diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan---
dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ---
5. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang ---
Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan -----
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan -
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan bursa efek---
di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: -----
 - a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-



Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang-
sahamnya. -----

b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ----
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai-
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----

2. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

3. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat -----
saham. -----

4. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ---
saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----

5. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat saham; -----

c. Nomor saham; -----

d. Jumlah saham; -----

e. Nilai nominal saham. -----

6. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor saham; -----

d. Jumlah saham; -----

e. Nilai nominal saham; dan -----

f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

7. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -----
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda -----
tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang ---
bersangkutan. -----



8. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis. -----
9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----
10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi ----- yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang ----- lainnya. -----
11. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -- dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal dan UU Perseroan Terbatas. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah ----- pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor ----- surat saham asli. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan -----



- jika:-----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas ----
hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan -
yang dipandang cukup oleh Direksi; dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di ---
Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu selambat -----
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ---
3. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh -----
Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
 4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini mengakibatkan ---
surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
 5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -----
pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham. -----
- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----
- **Pasal 8** -----
1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan serta memelihara Daftar Pemegang ----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham ----
yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak-----
gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. Perubahan kepemilikan saham jika ada; dan-----



- g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ---
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan --
surat kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang sah (seperti Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan itu belum ----
dilakukan, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham -----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat -
dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang Saham ----
dan daftar khusus sebaik-baiknya. -----
6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui secara -
tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang--
sah. -----
7. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau -----
penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi -----
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai -----
gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai -----
gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab -----
Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu---
dalam Daftar Pemegang Saham. -----
8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -----
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, -----
fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus--
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar -
pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek serta perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal. -----



9. Setiap Pemegang Saham berhak melihat daftar Pemegang Saham dan daftar khusus --
yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam ----
kerja kantor Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang ----
dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat --
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk -----
kepentingan Pemegang rekening efek pada bank Kustodian atau Perusahaan Efek----
tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian ----
dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,----
maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham --
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa----
dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan-
dalam daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ----
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa----
dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam daftar Pemegang Saham menjadi ----
atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. -----



6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan ----
klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan----
yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila ----
surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi-----
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak -----
tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut adalah -----
benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila ----
saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan-
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak ----
mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ----
pada rekening tersebut. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara----
dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek ---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari ----
kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang --
rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada-----
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS untuk -----
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk-----
penyelenggaraan RUPS.-----
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi -----



- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja----- sebelum RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan--- dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian----- bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan ----- kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Saham pada -- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan--- dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa ---- dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh ---- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham---- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang----- rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing---- pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian--- untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja----- setelah tanggal RUPS yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak - untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di----- wilayah Republik Indonesia di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----



1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilikan asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham ----- tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham----- Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak berwenang dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar -- serta Bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang----- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil - mereka yang sah. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk----- sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan----- kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada--- Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan----- dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam --- Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam daftar Pemegang Saham yang bersangkutan ----- maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi - yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan ----- pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ----- ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. -----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka ---- Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan----- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan - untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----



9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk --- mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan --- yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.-----
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ----- pemanggilan untuk RUPS, dalam hal terjadi pemanggilan ulang atau ralat maka----- *recording date* harus berubah menjadi 1 hari kerja setelah tanggal ralat Panggilan---- RUPS untuk menetapkan nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ----- Rapat yang dimaksud. -----
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang --- Saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih---- menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu----- disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk----- didaftar sebagai Pemegang Saham. -----
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti -- hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan ---- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang per-asuransi-an dan - Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur--- hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas -- saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak ----- menurut ayat 11 pasal ini.-----
13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan -- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek ditempat mana saham Perseroan dicatatkan. -----
14. Pemegang Saham yang meminta diselenggarakan RUPS, dan permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka ----- waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS dilaksanakan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----



----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 12.-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-----
yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur -----
dalam Pasal 13. -----
2. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam-----
Anggaran Dasar ini berarti baik "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" maupun
"Rapat Umum Pemegang Saham lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, -----
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut---
"RUPS Elektronik"). Yang dimaksud RUPS Elektronik adalah pelaksanaan RUPS ---
oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau
sarana media elektronik lainnya.-----
4. Perseroan dapat melaksanakan RUPS Elektronik dengan menggunakan e-RUPS -----
yang disediakan oleh: -----
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan;-----
 - b. Penyedia e-RUPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan berbentuk badan-----
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik-----
Indonesia; atau -----
 - c. Perseroan -----
sebagaimana diatur khusus dalam peraturan Pasar Modal.-----
5. Dalam hal RUPS Elektronik diselenggarakan oleh pihak sebagaimana disebutkan----
dalam ayat 4 huruf b dan c, maka pihak tersebut wajib terhubung dengan Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian biro administrasi efek untuk memastikan pemegang -
saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----
6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat-----



diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan ----
memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) huruf a ayat ini. -----

7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham. -----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :-----

- 1) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah.-----

- 2) Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi -----
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

c. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada ----
Dewan Komisaris.-----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6)-----
berdasarkan penilaian Direksi harus: -----

- 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
- 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam --
RUPS; -----
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran ----
dasar ini.-----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling --
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan-
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi. -----

f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat-
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau -----
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima)-
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini.-

g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud -----



dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15-----
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
Diterima. -----

Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang --
tidak diselenggarakan; dan -----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampau,-----
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan -----
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----

i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini diterima ---
Dewan Komisaris.-----

j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana ---
dimaksud pada huruf j ayat ini. -----

k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam-----
jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Dewan
Komisaris wajib mengumumkan: -----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan -----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi-----
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii---



- ayat ini. -----
- m. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib---
menyelenggarakan RUPS. -----
- n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana-----
dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling ---
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang --
tidak diselenggarakan; dan -----
2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- o. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud -----
pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, ---
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
- p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -
hari sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini telah terlampaui. -----
- q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini. -----
- r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana-
dimaksud dalam huruf e dan huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud dalam huruf i dan huruf p ayat ini dan pemegang saham sebagaimana-
dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan -----
anggaran dasar ini. -----
- s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini --
dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----



- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham----
dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ---
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
- 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan -----
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan-----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk --
menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya; atau -----
- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan-----
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang ---
diusulkannya.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir -----
sesuai ketentuan perundang-undangan-----
2. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24
Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika---
Perseroan mempunyai laba positif;-----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK -----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit ---
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian-
internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas---
pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. -----
 - d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----



3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan -- tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -- laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan ---- dan tindakan pidana lainnya.-----
4. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik----- yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan ----- wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar -- Modal.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** -----

----- **Pasal 13** -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan ---- Perseroan. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, -----
DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -**

----- **Pasal 14** -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di :-----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan; atau -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai ----- berikut : -----
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;-----
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan -----
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham.-----



4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara -----
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS; -----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib -----
diungkapkan secara jelas dan rinci; -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat ----
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS; -----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini secara mutatis mutandis berlaku
untuk :-----
 - 1) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----
 - 2) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris dalam hal -
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf o. -----
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham-----
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan; -----
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling -----
kurang memuat: -----
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;---
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 selain memuat
hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana -----



dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan-----
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau
Dewan Komisaris; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c
ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

- 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum --
kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh-
dalam RUPS pertama; dan -----
- 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap -----
rapat. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen-----
dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal;-----

f. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan-
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal; -----

g. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis berlaku untuk-----
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah-----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan-
sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada ---
Penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud huruf a merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:----

- 1) Dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----



- 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
 - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan -----
menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini. --
 - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham -
dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan sepanjang usulan mata
acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai -
dengan huruf d ayat ini. -----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling - kurang -----
memuat informasi: -----
 - 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - 2) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - 3) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi ---
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai-
dengan RUPS diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui ---
situs web Perseroan dan/ atau e-RUPS; dan -----
 - 7) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e ----
RUPS. -----
 - c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal; ----
 - d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan -----



harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang -----
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar--
Modal; -----

- e. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah-----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS -----
pertama diselenggarakan; -----
- b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat--
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku ----
tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan ---
lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan -----
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal-
ini. -----

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum-----
kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan-----
sebagai berikut: -----

- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan-----
ditetapkan oleh OJK;-----
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan ---
kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua-----
dilaksanakan; -----
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling-----



sedikit : -----

1) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan;-----

2) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

3) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS -----
pertama dan kedua; -----

4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS -----
kedua; dan -----

5) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan -----
penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini. -----

10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, ---
yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;

b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib-----
tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS;-----

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban---
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana ----
dimaksud pada huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi--
mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -----

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat ----
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan -
perundang-undangan. -----

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----



Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup ---- untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan ----- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa : -----

- a. Yang bersangkutan benar benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang -
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini; -----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan ---
tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini; -----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku dalam hal perubahan informasi ---
mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara ----
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak ---
memerintahkan pemanggilan ulang. -----

13. Hak pemegang saham dalam RUPS: -----

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPS; -----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----
kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang -----
saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----
 - 1) Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -



- 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; -----
- 2) Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14----
ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS; -----
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang -
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf b ayat ini.-----
14. Pemberian kuasa secara elektronik: -----
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS; -----
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat-----
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau --
memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--
undangan; -----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan -
pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh-----
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan -
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; -----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara ----
dalam pemberian kuasa secara elektronik;-----
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham -----
mencantumkan pilihan suara; -----



- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ---
ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-----
penyelenggaraan RUPS;-----
- h. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: -----
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik-----
pemegang saham; -----
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- i. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana---
dimaksud pada huruf h angka 2 ayat ini;-----
- j. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:-----
 - 1) cakap menurut hukum; dan-----
 - 2) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan-----
Karyawan Perseroan. -----
- k. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah-----
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,--
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan; -----
- l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang -----
penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan--
batal;-----
- m. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan----
suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dalam hal----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah--
dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah ----
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS-----
dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian ----
dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS; -----
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian----



dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS Perseroan; -----

- p. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang ----
saham dan harus melakukan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak -----
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

15. Penyedia e-RUPS: -----

- a. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga-----
Penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang ---
disetujui oleh OJK; -----
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan biro-----
adiminstrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini ----
wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah -----
Republik Indonesia; -----
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b -
ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem-
yang disediakan oleh Perseroan; -----
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit : -----
- 1) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - 2) Menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses
e-RUPS; -----
 - 3) Memiliki mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -----
 - 4) Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e ---
RUPS; -----
 - 5) Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
 - 6) Menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat -----
perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan-



- fitur e-RUPS;-----
- 7) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan ----
data e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum,-----
penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian; -----
- 8) Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat -----
pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia
pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -----
- 9) Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan -----
teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola -----
sistem teknologi informasi; -----
- 10) Menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
- 11) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau
kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan-----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban penyedia e ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini berlaku juga bagi -----
Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan --
pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada-----
huruf e angka 8 ayat ini;-----
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS; -----
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana--
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan-
OJK;-----
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana--
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:-----
- 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/ atau pemberian hak akses -----
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran pengguna e -
RUPS; -----
- 2) Biaya pendaftaran dan/ atau penggunaan e-RUPS;-----



- 3) Tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- 4) Hak dan kewajiban pengguna e-RUPS;-----
- 5) Batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- 6) Kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS-----
yang terdapat pada e-RUPS; -----
- 7) Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan ----
kewajiban pelaporan Perseroan;-----
- 8) Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ----
undangan; dan-----
- 9) Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna e-----
RUPS; -----

16. Media Publikasi dan Bahasa yang digunakan: -----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:-----
 - 1) Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - 2) Situs web bursa efek; dan-----
 - 3) Situs web Perseroan;-----Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing ----
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a butir 3 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ----
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam----
bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ---
dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan ----
sebagai acuan. -----
- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang dan
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----



sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -----

1) Situs web bursa efek; dan-----

2) Situs web Perseroan;-----

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----

yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 15** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak
hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir -----
dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan di dalam -----
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya -----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -
Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----
dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal -----
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua -----
anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh -----
salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas -----
Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
3. a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada Pemegang
Saham yang hadir.-----
b. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan -----



- kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai : -----
- 1) Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - 2) Mata acara Rapat; -----
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan -----
 - 4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
4. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. -----
 5. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling ---- sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS. --
 6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak disyaratkan apabila Risalah----- RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah RUPS. -----
 7. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS -- diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur ----- Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya. ----
 8. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut: --
 - a. Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan----- RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan ----- presentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang----- sah; -----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara----- Rapat; -----
 - e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau----- memberikan pendapat terkait mata acara, jika Pemegang Saham diberi ----- kesempatan;-----
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan; -----
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, ----- dan *abstain* (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika-----



pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----

h. Keputusan RUPS; dan -----

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang -----
berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen -----
tunai. -----

9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui: -----

a. situs web penyedia e-RUPS; -----

b. situs web bursa efek; dan -----

c. situs web perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

10. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat -----

2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -----

terkait dengan penyampaian risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang -----

diumumkan dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS kepada OJK mutatis -----

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang -----

telah memperoleh Penetapan Pengadilan. -----

11. Pimpinan Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada rapat untuk -----

membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang bersangkutan. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan ----

dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) ----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS -

kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) -----



- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a, b, c, dan d berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau ----- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material ----- berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) ----- jumlah kekayaan bersih. -----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan ----- kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang ----- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----- tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----- disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS ----- kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --



dengan hak suara yang sah; -----

- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per--empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada--huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS--ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang-----saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh-----Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar--Modal dilakukan dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)---bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---Pemegang Saham Independen; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -----disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS--kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ---bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;-----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan ---RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;-----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham -----



Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang ---
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----

4. RUPS untuk melakukan Perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan ---
disetor dalam batas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga-
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
5. RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang---
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan--
hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -



- mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga-
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan-----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran hanya dapat-----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah;-----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS-
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --



kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk ----
mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada -----
klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per-----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena -----
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;-----
 - e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas----
saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara,-----
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -----
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS-----
terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. ----
8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa-----
berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku; -----



- b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di --- bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS--- namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ---- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ---- untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak ----- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah ----- saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang ----- dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang --- saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda ---- sebagaimana dimaksud pada pasal ini. -----
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh ----- bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota ----- Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang -- bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara --- elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa. -----
13. Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. -----
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait - dengan mata acara RUPS. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----



1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan-----
kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi,
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----
2. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang-----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS-----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak-----
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk-----
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa-----
jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat--
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi ----
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : -----
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan-----
pailit;-----
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan --
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat :-----
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
 - b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota-----
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak
memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -----



- c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan----- keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----
- 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan-
- 6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang dibutuhkan Perseroan.-
4. Pemenuhan persyaratan, dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh --- calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat ----- pernyataan tersebut diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, ----- pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ----- pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota --- Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan--- tersebut. -----
7. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan ---- Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 --- (ke tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan ----- semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud----- pada ayat ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara ----- mereka. -----
8. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:-----
- 1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perseroan lain; -----
- 2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perseroan lain; ----- dan/atau-----
- 3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang- bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ---- Komisaris. -----
- Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan -----



- peraturan perundang-undangan lainnya.-----
9. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi -
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) .-----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi -----
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau -----
komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
11. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya-----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan-----
kepada Dewan Komisaris.-----
12. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka: -----
- a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan---
pengisian lowongan jabatan tersebut;-----
- b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan ---
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
13. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut--
adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud--
pada ayat 2 Pasal ini. -----
14. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan -----
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam-----
pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
15. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka
untuk sementara Dewan komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan-----
Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan-----
perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dengan kegiatan yang sedang ---
berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)---
hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi-----
lowongan tersebut. -----
16. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa -----



- jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang bersangkutan-----
menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari -----
kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil ----
penyelenggaraan RUPS.-----
- c. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
- d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap ---
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. -----
17. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris -----
dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota --
Direksi yang bersangkutan. -----
-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan ----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----
18. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18 harus diselenggarakan dalam jangka-----
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara :-----
- a. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak-----
dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal. -----
- b. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri. -----
19. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan-
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan didalam maupun di luar pengadilan. -----
20. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh ----
Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --



- membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu. -----
21. Perseroan wajib memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan -----
pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi -----
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ---
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2---
(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----
22. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. Masa jabatan berakhir;-----
- b. Meninggal Dunia; -----
- c. Pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat (17); -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya-----
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib --
menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya kepada RUPS. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN** -----

----- **WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan----
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam ----
Anggaran Dasar, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar-----
pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur-----
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :-----
- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
- 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan-----
Perseroan;-----
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di ----
dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yang
ditunjuk untuk itu termasuk karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri -----



- maupun bersama-sama dan/atau badan lain;-----
- 3) Mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk penetapan ----
upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja ----
Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau Kepala ----
Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
 - 6) Menghapus bukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada -----
Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam ----
Laporan Tahunan;-----
 - 7) Tidak menagih lagi piutang, bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di
luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka -----
penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada ----
Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan--
oleh Dewan Komisaris; -----
 - 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan -
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan -----
pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala --
kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS. ----
- b. Direksi berkewajiban untuk : -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-----
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, -----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja-----
lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris



- dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ---
Risalah Rapat Direksi; -----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, ----
sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta -----
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-----
undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
- 5) Menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk ----
diaudit; -----
- 6) Menyampaikan laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris -
dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku ----
Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS, mengenai Laporan Tahunan; -----
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan; -----
- 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang ----
undangan; -----
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, ----
Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi dan Laporan ----
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf
b.4 dan b.5, dan dokumen Perseroan lainnya; -----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah -
Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta
dokumen Perseroan lainnya; -----
- 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan administrasi Perseroan sesuai --
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -----
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan--
dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi -----



- pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
- 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan-----
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh ----
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;-----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian -----
tugasnya;-----
- 16) Merencanakan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi-
yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan *cash management*, -----
logistik, pengadaan, *capital expenditure* dan lainnya;-----
- 17) Merencanakan dan menyusun kebijakan strategis dan operasional yang ---
belum ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan sebagaimana
dimaksud pada huruf b.2 di atas;-----
- 18) Menyusun piagam Direksi;-----
- 19) Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan pengurusan
perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan-----
Komisaris;-----
- 20) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta -
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan khususnya di bidang Pasar Modal; -----
- 21) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini yang ditetapkan oleh RUPS. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan-----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----
Direksi dapat membentuk komite. -----
b. Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja-----
komite setiap akhir tahun buku.-----
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang -----



- bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan -----
usaha Perseroan. -----
6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh -----
rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan ----
tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.-----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi -----
atau sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kerugian Perseroan apabila: -----
- a. dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau-----
kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk -----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak -----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----
9. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara-----
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang ---
sah. -----
- 10 a. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris untuk : -----
- a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan--
dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan-----
Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; ---
- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam -----
bentuk Kerjasama Operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama ---
lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun



- Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik ----
(*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai ----
sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari ----
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- c. menetapkan dan mengubah logo/merek Perseroan; -----
- d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; -----
- e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk ---
perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan -----
Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan -
patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; ---
- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai--
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi-----
signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris; -----
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan --
pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan -nilai ----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- i. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- j. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal; -----
- k. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak-----



- bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup ----
dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
- l. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan --
barang mati dengan nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- m. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, ----
kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang -----
dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- n. tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan. -----
- o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang
menggunakan pembiayaan oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan -----
usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- q. Mendirikan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan ----
hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang -----
dibentuk oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan ----
Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----
- 10 b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p) --
dan (q) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan -----
persetujuan pemegang saham mayoritas. -----
- 10 c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), --
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p), dan (q) ayat ini dengan batasan dan/atau --



- 10 d. kriteria tertentu setelah mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas. ----
Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (e), (f), (g), dan (h) -
ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk -
melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan --
kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang -----
bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -
11. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak ----
memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, maka -----
Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. -----
12. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapat persetujuan dari RUPS untuk: -----
- a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang -----
pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas; -----
- b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. -----
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama waktu -
1 (satu) tahun buku; -----
14. a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi -----
mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu ----
1 (satu) tahun buku; -----
- b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b adalah -----
transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun -
buku atau lebih. -----
15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan --



- RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum -----
tersebut beritikad baik.-----
16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan sebagai-----
jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 13 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili ----
Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum -----
kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling ----
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan ----
hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau-----
persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat
pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan -----
Komisaris atau RUPS. -----
18. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan -----
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan-----
Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara -----
setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan-----
kepentingan.-----
19. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang---
diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang -----
undangan yang berlaku.-----
20. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua -
tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. -----
21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi ----



- yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----
22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi ----
yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----
23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam ----
jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----
24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota -
anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk -----
melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. -----
25. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib -----
disetujui dalam Rapat Direksi. -----
26. Direksi untuk perbuatan terlentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan --
kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang -
diatur dalam surat kuasa. -----
27. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara -----
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
28. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh ----
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan -----
dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
29. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi -----
yang bersangkutan; dan -----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
30. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29), yang berhak ----



mewakili Perseroan adalah: -----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -----
dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau --
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -----
kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur ----
Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan ----
dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau --
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - a. Dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi; ---
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota--
Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus -----
dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi -
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa -----
kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal dengan telex atau telefax harus -----
ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau -----
dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ---
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ----



- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga - dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat--- Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota --- Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----
7. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diungkapkan dalam laporan tahunan ----- Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum--- berakhirnya tahun buku.-----
- a. Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta ----- paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
- b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah----- disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum--- rapat diselenggarakan. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ---- Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila --- lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ----- ditolak. -----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; ----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup--- tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; -----



c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ----
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----
yang dikeluarkan.-----

13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah
Rapat. -----

14. Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan kemudian-----
harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir ---
dalam Rapat.-----

15. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan -
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.-----

16. Apabila Risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak-----
disyaratkan. -----

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, -----
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -----
seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut. -----

18. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota-----
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

20. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang-----
tidak rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam ---
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat yang didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris.-----

a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.-----



- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% -----
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 - c. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama-
atau Presiden Komisaris. -----
 2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak ----
dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mutatis mutandis berlaku ----
bagi anggota Dewan Komisaris. -----
 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris -----
Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan -----
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -----
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali ----
untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada ----
periode berikutnya;-----
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada -----
Perseroan tersebut; -----
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan-----
Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan; dan -----
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung-----
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
 5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini, -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan ----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan-
yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang ----
memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup -----
untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan. -----



6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ----
Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.-----
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi -----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:-----
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain; dan -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain. -----
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan lain. -----
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling ----
banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga-----
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
 - b. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 - c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur -----
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang -----
mengatur lebih ketat.-----
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan-----
dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen ---
tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -----
 - a. Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan dalam -----
laporan tahunan. -----
 - b. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris -----
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite -----
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
 - c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur -----
ketentuan mengenai masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku adalah yang mengatur lebih ketat. -----



11. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal-
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak-----
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di-----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komsaris sebelum masa-----
jabatannya berakhir.-----
12. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat ----
kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik-----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan---
yang sah.-----
14. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang -----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
15. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan komisaris lowong, maka: -----
 - a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan ---
pengisian lowongan jabatan tersebut; -----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangu-
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Dewan--
Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
17. Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi 2 (dua) hari setelah-----
penerimaan surat permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.-----
18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.-----
19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya waktu tersebut, -----



- terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut menjadi-----
sah tanpa memerlukan Persetujuan RUPS. -----
20. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari -----
tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama ----
masa jabatannya. -----
21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka terhadap
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru-----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
22. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang-----
diberhentikan berdasarkan ayat 3 diatas untuk mengisi lowongan karena sebab -----
lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris-----
yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan-----
anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. -----
23. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 16; -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS. -----
24. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada-
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3, ayat 11, ayat 17 huruf b, ayat---
18 dan ayat 19 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
25. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 17 ayat 17 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----
- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN** -----
- **WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----
- **Pasal 21** -----
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha -----



Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi --- termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, --- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan --- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan --- yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan --- Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, --- memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga -- dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh ---- Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai ---- segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ----- dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan ---- sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan ----- Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan --- anggaran dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite- Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan--- memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu --- tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu ---- untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --



- ini. -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan ----
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern. -----
 - 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan-----
terhadap hal-hal yang dibicarakan;-----
 - 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, --
dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan --
Perseroan; -----
 - 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran----
Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi,-
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat ---
dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap -----
masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
 - 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi gejala--
menurunnya kinerja Perseroan; -----
 - 5) mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan -----
Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku ----
Perseroan. -----
 - 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang -----
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. -----
 - 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
 - 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; --
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya-----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-----
 - 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ---



- selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
 - 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham. -----
 - 13) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan----- termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham--- Mayoritas;-----
 - 14) Menyusun piagam Dewan Komisaris;-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: ----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ---- pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam ----- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ----- peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung----- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan: -
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung -----



jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud-
dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; -----

- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ----
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)-
bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota ----
Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan. -----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
5. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan ----
Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung kepada setiap -----
anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat--
tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax.-----
b. Dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat -----
tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat -----
mungkin, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
6. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ---
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan.-----
8. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih ----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan-----



- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris -----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang-----
Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan-----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -----
surat kuasa.-----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota-----
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
12. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan --
Komisaris.-----
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----
berdasarkan setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak. --
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --
yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -----



sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----

16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris -----
dibuat Risalah Rapat. -----
17. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -----
Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani -----
oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -----
Rapat. -----
18. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang --
sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani keputusan tersebut. -----
20. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 23 -----

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
2. Pedoman paling kurang memuat: -----
 - a. Landasan hukum; -----
 - b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; -----
 - c. Nilai-nilai; -----
 - d. Waktu kerja; -----
 - e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; ---
dan -----
 - f. Pelaporan dan pertanggung jawaban. -----
3. Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa -----



Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman yang juga telah dimuat -- dalam situs web Perseroan. -----

4. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.-----
5. Kode etik paling kurang memuat: -----
 - a. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, ----- dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan ----- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan -----
 - b. Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/ ----- pegawai, dan/ atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat --- benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
6. Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/ pegawai yang bekerja pada ----- Perseroan, yang juga telah dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----
7. Setiap anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil ----- keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ----- Perseroan selain penghasilan yang sah. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Direksi menyampaikan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada ----- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai ----- yang sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas ----- setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
 - b. Rencana penghapusan buku dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan; -----
 - c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;-
 - d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; -----
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan -----
 - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris. ---



2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku. Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai;-----
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama pada akhir bulan Desember. -
3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan.-----
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan pada saat pemanggilan RUPS Tahunan. -----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba-Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan



dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca---- dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS Tahunan, dalam --- usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat----- disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini---- serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan apabila --- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif Berdasarkan keputusan yang diambil-- dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran-- dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana ---- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

a. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS----- Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.-----

b. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih --- setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan ---- Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----

3. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara ---- (dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika ----- pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi -- lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib,----- dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut harus----- diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS----- Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran----- Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham--- saham Perseroan dicatatkan.-----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ---



tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya-----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian ----
dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, --
dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah --
disetujui oleh RUPS Tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
6. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 -----
(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana -----
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
 - a. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang -----
Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan---
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh-----
Direksi Perseroan. -----
 - b. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS
setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) -
dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang -----
diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan
agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan-----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh ----



laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang --- Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan ----- keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan ----- dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama,----- tempat kedudukan, maksud, dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya----- Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor - dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau----- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2-- Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia. -----
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak---- tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)-- hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat ---- dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali----- mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari----- sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS - serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih-- dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat



apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



b. Dan dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara ----
untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS-----
selanjutnya ditetapkan oleh Ketua OJK. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia--
1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan penggabungan, -
peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum panggilan RUPS. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS ---
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam --
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak ----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya
ditetapkan oleh Ketua OJK. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya ----
(jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan berdasarkan keputusan--



- RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka -----
- Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----
4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku--
juga bagi likuidator. -----
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan:-----
- a. Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan -----
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan cara mengumumkan -----
pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1
(satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik --
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Likuidator dan Berita Negara Republik Indonesia;
- b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam ----
daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;-----
- c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua OJK sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan;
b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang Saham --
dan setiap Pemegang Saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai ---
nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya; -----
- c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya---
perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada para Likuidator.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----



----- **Pasal 30** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka-RUPS yang akan memutuskan. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib-mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan di Bidang Pasar Modal dan-Undang-undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan-----keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak -----bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-----Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. -----

-Sehubungan dengan persetujuan Rapat tersebut di atas dan berdasarkan Daftar -----Pemegang Saham per tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh -----empat), maka susunan pemegang saham pada bagian akhir dari Anggaran Dasar menjadi -berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menetapkan susunan para pemegang saham Perseroan, mengingat saham-saham----Perseroan telah seluruhnya tercatat di Pasar Modal yaitu sebagai berikut :-----
bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah -----diambil bagian dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham, yaitu : -----
 - Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT
WIJAYA KARYA (Persero) Tbk sebanyak 5.229.279.960 (lima miliar dua
ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp522.927.996.000,- (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua
puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah); -----
 - Koperasi Konsumen Karya Mitra Satya sebanyak 410.069.149 (empat ratus
sepuluh juta enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 41.006.914.900,- (empat puluh
satu miliar enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus
Rupiah);-----
 - Yayasan WIJAYA KARYA, sebanyak 86.043.040 (delapan puluh enam juta



empat puluh tiga ribu empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya--
sebesar Rp8.604.304.000, (delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus---
empat ribu Rupiah)-----

- Masyarakat sebanyak 2.990.074.451 (dua miliar sembilan ratus sembilan-----
puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp299.007.445.100,- (dua ratus
sembilan puluh sembilan miliar tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu
seratus Rupiah);-----

sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus
lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau dengan --
nilai nominal sebesar Rp871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar---
lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah). -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli -----
tandatangan penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen -----
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan ----
kepada saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notaris, dan penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada -----
lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang ---
tidak terpisahkan dari akta ini serta dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya-----
atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami-
dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa
atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka penghadap -----
setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani --
akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. -
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya,
Notaris.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -Bapak ROBBY ZIDNI ALFARIZI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 24-08-1999----

(dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Perum Limas Indah
Jalan Prisma 1 Nomor 25, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. -Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -----
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun -----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----
002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan dua coretan dengan penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta

DECISION STATEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
abbreviated as PT WIKABETON Tbk

-Number:

-On this day,

date

-Hour

West Indonesia Time.-----

-Present in front of me, Engineer NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,-
Bachelor of Law, Notary in Jakarta, attended by witnesses who have been me,-----

The notary knows and his names will be mentioned at the end of this deed;-----

Mr. KUNTJARA, born in Sukabumi, on 04-10-1970 (four October--year one
thousand nine hundred and seventy), Indonesian citizen, President Director -of the
Company hereinafter referred to as below, residing at Raffles Hills Block B. 2
Number 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan----Harjamukti,
Cimanggis District, Depok City, West Java;-----

-Population Identification Number Holder: 3374110410700005.-----

- Temporarily in Jakarta.-----

-According to his statement in this case acting in his position, on power of attorney
granted in the Annual General Meeting of Shareholders of PT WIJAYA KARYA
BETON Tbk held on 17-05-2024 (seventeen May year two thousand twenty-four)
thus representing PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, domiciled in East Jakarta
(hereinafter referred to as the "Company"), whose amendments to the entire
Articles of Association are contained in the Deed dated 08-01-2014 (eight January
years two thousand and fourteen) Number 03 made before MOCHAMAD NOVA
FAISAL, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Jakarta, Which Deed has
obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia as it turns out from the Decision Letter dated 09-01-2014 (nine January

years two thousand fourteen) Number: AHU-01257. AH.01.02.Year 2014.-----

The Articles of Association which have been amended several times and last amended by deed-----deed dated 08-06-2023 (eight June year two thousand and twenty-three) number 09, made before me, the Notary, has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as it turns out from his Decree dated 12-06-2023 (twelve June years two thousand and twenty-three) number: AHU-0032467. AH.01.02.Year 2023 and the receipt of the notification of the amendment of the Company's articles of association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter dated 10-06-2023 (ten June year two thousand and twenty-three) number AHU-AH.01.03-0075858.-----

-The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners is last contained in the deed dated 12-05-2023 (twelve May years two thousand and twenty-three) number 17, made before me, the Notary, receipt of the notification of data changes The Company has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter dated 15-05-2023 (fifteen May years -- two thousand twenty-three) number: AHU-AH.01.09-0117313.-----

- The Witness acts as such, explaining first in this deed:-----
that on 17-05-2024 (seventeen May of the year two thousand and twenty-four), located at WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Plot 9-10, East Jakarta, the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") was held.-----

-that the Minutes of the Company's Meeting are contained in my deed, Notary dated 17-05-2024 (seventeen May year two thousand twenty-four) Number : 42.-----

The Meeting has been attended or represented, including the Shareholders who are present both physically and electronically through online e.ASY. KSEI, amounting to 5,916,014,049 (five billion nine hundred and sixteen million fourteen thousand forty-nine) shares or representing 67.88% (sixty-seven point eight eight percent) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued/issued by the Company as

of the date of this Meeting, which is a total of 8,715,466,600 (eight billion seven hundred and fifteen million four hundred sixty six thousand six hundred) shares, by taking into account the Company's Register of Shareholders, therefore the provisions regarding the quorum of attendance at the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 (two thousand seven) concerning Limited Liability Companies and Regulations in the field of Capital Market, have been fulfilled.-----
-that the meeting was held, among other things, to approve:-----

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association

-that the appellant has been authorized with the right of substitution to restate-----
decision on the amendment of the Company's Articles of Association in the Notary deed and further convey to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia and/or the authorized agencies to obtain approval, reporting -----
and/or receipt of notification of amendments to the Company's Articles of Association and take all necessary actions in accordance with the provisions of the law and applicable laws and regulations.-----
-Therefore, based on the power of power given by the Meeting, the act as stated as stated that in the Company's Meeting these have decided, among others: -----

1. Approve to amend the Company's Articles of Association;
2. Agree to restate all provisions in the Articles of Association in connection with the amendments as intended in point 1;
3. Agreeing to give power of attorney and authority to the President Director or other Directors with the right of substitution to carry out all actions taken in relation to the decision of the agenda of this meeting into a notary deed and submit it to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of amendments to the Company's Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful for such purposes without any of them are exempted, including to make additions and/or changes to the Articles of Association if it is required by the authorized agency.-----

In connection with the above, it amends several articles in the Company's Articles of Association include shareholder adjustments, but to make it easier to read, the Company's

Articles of Association are rearranged to read as follows: -----

----- **NAME AND PLACE OF RESIDENCE** -----

----- **Article 1** -----

1. This Limited Liability Company is named:-----
PT Wijaya Karya Beton Tbk, abbreviated as PT WIKA Beton Tbk (hereinafter referred to as this Articles of Association is simply abbreviated as the Company), domiciled and headquartered in East Jakarta. -----
2. The Company may open an office or establish a representative office or unit other businesses in other places, both inside and outside the territory of the Republic-----
Indonesia as determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Directors Commissioner.-----

----- **PERIOD OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY** -----

----- **Article 2** -----

The company was established on 11-03-1997 (eleven March 1997 One hundred and ninety-seven) and has been ratified on 09-12-1997 (nine December one thousand nine hundred and ninety-seven) number: C2-12776. HT.01.01.TH.97, and was established for an indefinite period of time.-----

----- **PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES** -----

----- **Article 3** -----

1. The Company's aims and objectives are:-----
Doing business in the field of trade and concrete industry, construction services and other related business fields.-----
2. To achieve the above objectives and objectives, the Company may carry out the main business activities are as follows:-----
 - a. Planning, Production, Sales, Installation and Construction Implementation of all concrete products, including:-----
 - 1) Cement and Lime Goods Industry for Construction [23953]-----
It includes the business of making various goods from cement and or lime or artificial stone for construction purposes such as tiles, bricks/walls, concrete pipes and prestressed concrete, boards, sheets, panels, pillars and

so on, components of prefabricated structures for buildings or civil buildings and building materials from plant growing substances (wood wool, reeds, straw etc.) which are joined together with cement or other mineral mixing materials-----

- 2) Installation of Foundations and Piles [43901]-----
Includes special activities for the installation of various foundations and pillars--- piles including concrete casting and foundation ironing for--- buildings, roads/bridges, irrigation buildings, docks, buildings offshore and the like as part of the work that is covered in the construction of residential and non-residential buildings and other civil buildings.-----
- 3) Offshore Building and Floating Building Industry [30112]-----
Includes the business of manufacturing offshore construction or buildings and floating buildings, including equipment and equipment, such as platform construction, floating buildings or diving for drilling activities; construction of floating buildings, such as floating docks, lifeboats and floating faucets, floating bridges, pontoons, coffer-dams, floating landing place buildings, living quarters, jackets, platforms- and morning buoys, buoys, floating tanks, barges,--- barges, cranes, rafts that can be filled with air not for recreation and others. Including the manufacture of hovercraft, except-recreation type hovercraft.-----
- 4) Wholesale Trade of Various Building Materials [46638]-----
It covers large trading businesses of various materials buildings, such as cement, sand, nails, paints and others.-----
- 5) Fire-Resistant Brick, Mortar, Cement, and Similar Industries [23911] It includes the business of making various types of fireproof bricks, mortar fireproof and fireproof cement, concrete and similar composites that are fireproof, such as alumina, silica and basic-----

- b. Conducting planning, implementation and supervision services -----
Construction in the field of business:-----
 - 1) Civil;-----

- 2) Electrical;-----
- 3) Postensioning.-----
- c. Planning, Production and Sales of products/material components building.
- d. Conducting import and export businesses related to these activities in the letters a, b, and c above.-----
3. In addition to the main business activities as intended in paragraph 2, the Company may Carrying out supporting business activities in order to optimize the utilization of resources owned for:-----
 - a. Doing Industrial Business and Trading of Concrete Production Materials:-----
 - 1) Ornamental Stone and Building Stone [No. 8101]-----
It includes the business of quarrying ornamental stones and building stones such as marble or marble, andesite stones (elephant stones, base courses), paras, obsidians, and granite. Including here the activities of solving, separating and cleaning.-----
 - 2) Gravel Excavation (sirtu) [08103]-----
Includes the effort of excavating, cleaning and separating gravel.-----
The results of gravel excavation include sandstone, hard blocks and-gravel sand.-----
 - 3) Sand Excavation [08104]-----
Includes excavation, cleaning and sand separation efforts. The results of sand excavation are in the form of concrete sand, tidal sand (little-----containing soil), uruk sand (containing a lot of soil) and others.-----
 - 4) Excavation of soil and clay [No. 8105]-----
Includes soil and clay excavation efforts. Activities formation, destruction and grinding that cannot be administratively separated from the excavation of soil and clay are included in this group. The results of excavation of soil and- clay/clay include kaolin (china clay), ball clay (firing----- clay), earth ash, shale and urug.-----
 - 5) Excavation of stones, sand and other clays [No. 8109]-----
Includes the quarrying of stones, sand and other clays.-----

- 6) Mining and Other Excavation Supporting Activities [09900]-----
This group includes supporting services on the basis of remuneration or-- contracts, which are needed in mining activities of the main group 05, 07, and 08 such as exploration services for example by traditional methods--- such as taking ore samples and making observations geology, pumping services and distribution of mining products and services----- excavation experiments and drilling fields or mining wells.-----
- 7) Fire-Resistant Brick, Mortar, Cement, and Similar Industries [23911]----
It includes the business of making various types of fireproof bricks, mortar fireproof and fireproof cement, concrete and similar composites that are fireproof, such as alumina, silica and basic-----
- 8) Cement Industry [23941]-----
It includes the business of making various types of cement (hydraulic cement and charcoal or iron scale), such as portland, natural, cement----- containing aluminum, slag cement and superphosphate cement and other types of cement.-----
- 9) Ready-to-Use Mortar or Concrete Industry [23957]-----
Includes the business of making ready mixed and dry mixed concrete and mortar.-----
- 10) Stone Goods Industry for Household Use,-----
Displays, and Building Materials [23963]-----
It includes the business of making various items from stone for---- household use, displays, and building materials, such as stone broken and stone ash-----
- 11) Wholesale Land Transportation (Not cars, bicycles-----
motorcycles, and the like), its spare parts and equipment [46593]-----
Includes large trading in various means of transportation--land, motorized or non-motorized (not cars, motorcycles--- and the like), including large trading of various kinds of spare parts and equipment-----
- 12) Wholesale Trade on the Basis of Fees or Contracts [46100]-----

Includes the business of agents who receive commissions, brokers,---- auctioneers, and other wholesalers who trade goods domestically and abroad on behalf of other parties its activities include commission agents, brokers of goods and all other large trades that sell on behalf of other parties; activities involved in the sale and purchase together or conducting transactions on behalf of the Company, including over the Internet; and agents engaged in trade such as agricultural raw materials, live animals; raw materials for textiles and goods emi-finished; fuel, ore, metals and chemical industries, including fertilizers; food, beverages and tobacco; textiles, clothing, furs, footwear and leather goods; timber and materials buildings; machinery, including office machinery and computers, industrial supplies, ships, aircraft; furniture, household goods and- hardware; large trading activities of auction houses; Radioactive Substances Commission and Ionizing Radiation Generator. Including----- commodity auction market organizers. Excluding activities the large trade in cars and motorcycles, is included in groups 451 to 454.-----

13) Great trade in cement, lime, sand and stone [46634]-----

It covers the large trading of cement, lime, sand, and stone for construction materials, such as white Portland cement, Portland-gray cement, lime cement cement, Portland cement, plaster lime, wall lime, sand, gravel, coral, stone, broken stone, stone slabs, alabaster and mosaic cubes.-----

14) Wholesale Trade of Various Building Materials [46638]-----

It includes large trading businesses of various materials buildings, such as cement, sand, nails, paints and others.-----

15) Large Trade in Non-Metallic Minerals [46641]-----

It covers the major trading of non-metallic minerals such as----- diamonds, corundum, graphite, arsenic, quartz sand, fluorspar, cryolite, iodine, bromine, chlorine, sulfur, phosphate, halite, asbestos, talc, mica, magnesite, yarosite, ochre, fluorite, ball clay, zeolite, kaolin, feldspar,

bentonite, gypsum, dolomite, calcite, lijang, pyrophyllite, quartzite, zircon, wolastonite, alum, quartz, perlite, rock salt, clay, and limestone for cement.-----

16) Retail Trade of Metal Goods for Construction Materials [47521]-

Covers the retail trading business of metal goods specifically for----- construction materials such as reinforcing steel, profile steel, steel plates, and sheet steel, iron/steel pipes, rope wire, mosquito wire, nails, nuts/bolts, hinges, deadbolts, locks, keys, water tanks, water towers, rolling doors, awnings and zinc sheets.-----

17) Retail Trade of Cement, Lime, Sand and Stone [47524]-----

It covers the retail trading business of cement, lime, sand and- stones for construction materials, such as white portland cement, cement gray portland, lime cement plaster, Portland cement posolan, tohor lime, wall lime, sand, gravel, coral, stone, broken stone, slab stone, alabaster stone and mosaic cubes.-----

b. Conducting Planning, Implementation and Supervision Services business-----

Construction in the field of business:-----

1) Residential Building Construction [41011]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts Buildings used for housing, such as residential houses,-- temporary houses, flats, apartments and condominiums.- Including the construction of residential buildings carried out by real estate companies with the aim of selling and activities alteration and renovation of residential buildings-----

2) Industrial Building Construction [41013]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts Buildings used for industry, such as industrial buildings factories, workshops/workshops, buildings factories for the management and processing of nuclear materials. Including activities to change and renovate industrial buildings.-----

3) Health Building Construction [41015]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts buildings used for health facilities, such as hospitals, polyclinics, health centers, treatment centers, service buildings health and laboratory buildings. Including activities to change and renovate health buildings.-----

4) Construction of Education Building [41016]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts buildings used for educational facilities, such as school buildings, course places, laboratories and other educational support buildings. Including activities to change and renovate the education building.-----

5) Construction of Entertainment and Sports Venue Building [41018]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts buildings used for entertainment venues, such as cinemas, cultural/arts buildings, tourism and recreation buildings and sports halls. This includes the construction of buildings for entertainment venues undertaken by real estate companies with the aim of for sale and the alteration and renovation of venues entertainment and sports buildings-----

6) Other Building Construction [41019]-----

Includes construction, maintenance, and/or development efforts buildings used for use other than in groups--- 41011 to 41018, such as places of worship (mosques, Catholic churches, Christian churches, temples, temples, temples), terminal buildings/stations, Yasa halls (trains), monumental buildings, state and government buildings central/regional buildings, airport buildings, aircraft hangar buildings, buildings PKPPK (Airport Fire Department), historical buildings, prison buildings, meeting hall buildings, warehouses, generator buildings, pump houses, depots, power house buildings, electrical substation buildings, signal substation buildings, tower buildings, storage buildings including explosives storage and others. Including other activities changes and renovations of the building-----

- 7) Building Prefabrication Construction Services [41020]-----
Includes the installation of factory-produced materials such as precast concrete, steel, plastic, rubber, and other factory products by fabrication, erection, and/or assembly methods for buildings.-----
- 8) Construction of Civil Buildings on Roads [42101]-----
Includes construction, maintenance, and/or development efforts road buildings (highway, medium, and small), freeways barriers/toll roads, and airstrip roads (runways, taxis, and parking), and container yards. Including activities to support the development, improvement, maintenance of the construction of fences/retaining walls. Excludes overpasses.-----
- 9) Construction of Civil Buildings Bridges, Overpasses, Fly Overs, and-----
Underpass [42102]-----
Includes development, maintenance, and/or reconstruction of bridge buildings (including rail bridges), overpasses, underpasses, and fly overs. Including activities construction, improvement, maintenance of supports, complements and bridge and overpass equipment, such as fences/walls---retainers, road drainage, road markings, and signs.-----
- 10) Railway Construction [42103]-----
Includes construction, maintenance, and/or development efforts back to the rail road. Like a railroad for a railway. Including installation work of rail and railway bearings and stockpiling gravel (grade A aggregate) for railway road bodies.-----
- 11) Construction of Irrigation and Drainage Networks [42201]-----
Includes construction, maintenance, and/or development-rebuilding irrigation water channel network and drainage network.-----
- 12) Construction of Clean Water Treatment Civil Buildings [42202]-----
Includes construction, maintenance, and/or development efforts buildings for tapping and distributing raw water, buildings raw water treatment, drinking water treatment buildings, buildings Drinking water towers,

- drinking water reservoirs, pipelines/distribution networks clean water distribution, drinking water tanks and other water drinking water complementary buildings-----
- 13) Construction of Civil Buildings, Infrastructure and Facilities of Processing Systems Solid, Liquid and Gaseous Waste [42203]-----
Includes development, maintenance and/or development efforts. again tapping and distributing raw water buildings, buildings raw water treatment, drinking water treatment buildings, buildings drinking water towers, drinking water reservoirs, pipelines/distribution networks clean water distribution, drinking water tanks and other water drinking water complementary buildings-----
- 14) Electrical Civil Building Construction [42204]-----
Includes development, maintenance, and/or redevelopment of electrical civil buildings such as power generation, transmission, distribution and installation of power utilization electricity, local and long-distance power pipelines including construction of substations and installation of power poles and towers.-----
- 15) Construction of Telecommunication Civil Buildings for Infrastructure Transportation [42205]-----
This group includes development, maintenance, and/or redevelopment of telecommunication facility buildings sea navigation auxiliary facilities, air navigation telecommunication buildings, railway signal and telecommunication buildings, including buildings towers/poles/pipes/antennas and similar buildings.-----
- 16) Construction of Irrigation, Communication and Other Waste Networks [42209]-----
Includes development, maintenance and/or development efforts. again other construction buildings that have not been covered groups 42201 to 42207. Including the arrangement and environment, infrastructure of residential areas, industries, hospitals and others.-----

- 17) Construction of Civil Buildings Sports Facilities [42918]-----
Includes development, maintenance, and/or -----
redevelopment of sports facility buildings such as stadiums, sports fields
(football, baseball, rugby, car and motorcycle racing tracks), basketball
courts, hockey, tennis courts, golf courts, swimming pools, steel-walled
swimming pools Olympic standard galvanized stainless steel, athletic
tracks, archery fields, sports courts and others.-----
- 18) Other Civil Building Construction Ytdl [42919]-----
Includes development, maintenance and repair efforts-----
Other civil buildings that have not been covered by group 42911-- to
42918, such as parking lots and other residential environmental facilities
(outside buildings). This group includes the division of land with its
development (e.g. addition of roads, infrastructure public and others).
Including the procurement and implementation construction of
microelectronics facilities and processing plants, such as--- which
produce microprocessors, silicon chips and wafers, microcircuits, and
semiconductors; procurement and implementation construction of textile
and garment processing plants; procurement and implementation of iron
and steel processing construction; and/or procurement and
implementation of other processing plant construction.-----
- 19) Coastal Protection Construction Work Services [42922]-----
Includes development, maintenance and/or -----
Rebuilding of beach protection buildings including groin, breakwater,
seawall, artificial headland, beach nourishment, reef-making and other
similar works.-----
- 20) Construction of Civil Buildings Chemical Product Processing Facilities,
Petrochemical, Pharmaceutical and Other Industries [42923]-----
Includes development, maintenance and/or rebuilding basic chemical
processing plants; fertilizer processing; plastic factories and rubber
processing plants; processing agrochemical products; Other chemical

processing plants including pharmaceutical and petrochemical product
processing plants.-----

21) Other Civil Building Special Construction Ytdl [42929]-----

Includes development, maintenance and/or reconstruction of other special
construction of civil buildings that have not been covered by group 42921
to 42924.-----

22) Civil Building Prefabrication Construction Work Services [42930]-----

Includes the installation of factory-produced materials such as precast
concrete, steel, plastic, rubber and other factory products by fabrication,
erection and/or assembly methods for civil buildings.-----

23) Land Preparation [43120]-----

Covering land preparation efforts for construction activities that-----
next, such as the implementation of land clearing and maturation---
construction, and clearing of shrubs; land clearing/soil stabilization,
(excavation, making slopes, dredging, land leveling-construction, trench
excavation, removal, demolition or stone blasting and so on);
Implementation of earthworks and/or rocky soils, excavation, making
slopes, leveling soil with excavation and heaps for the construction of
roads (highway, medium, and small), expressways, railway roads, and
airstrip roads (runways, taxis, and parking), factories, power plants,
transmissions, substations, and distribution of electric power, production
facilities, as well as buildings and other civil buildings; installation,
relocation and protection of utilities, tests/tests with sondir and drills,
drilling, material extraction, and field investigations/sampling for
construction, geophysical, geological or similar purposes; and land
preparation for nuclear power facilities. Supporting activities for land
preparation such as installation of construction auxiliary facilities
(installation of sheet piles, project nameplates, and culverts for cable
installation, office construction work, basecamp, kit directors,
warehouses, project workshops), re-measurement, construction/diversion

of temporary roads, repair and maintenance public roads, dewatering/drying, mobilization and demobilization, and other similar works.-----

24) Engineering and Technical Consulting Activities [71102]-----

Includes engineering design, and consultancy activities, such as machinery, factories and industrial processes; projects that involve civil engineering, hydraulic engineering, traffic engineering; Consulting Services and Engineering Consulting, Building Construction Engineering Services Residential and Non-Residential Buildings, Civil Engineering Work Engineering Service Water Resources, Engineering Services for Mechanical Work in Buildings, Sports Facilities Building Engineering Services, Environmental Engineering Consulting Services, Consulting Services Related to Traffic Control System Construction, Network Plant Construction Engineering Services Transmission, Substations, and distribution of electrical power and engineering services for industrial processes, production and production facilities, other engineering services, expansion and realization of projects related to electrical and electrical engineering, mining engineering, chemical engineering, mechanics, industrial engineering and systems engineering and safety engineering; water management projects; and project and service management activities field investigations related to construction; activities project expansion using air conditioning, cooling, cleaning and pollution control techniques, acoustic techniques and others; activities geophysical, geological surveys and seismic or earthquake surveys including prospectus making services and geological and- geophysical interpretation services for the construction sector; Geodetic survey activities include boundary and soil survey activities, hydrological surveys, surveys of conditions above and below the ground level and spatial information and cartography activities including mapping activities and mapping services. Including civil engineering services,

transportation, technical facilitation services infrastructure and public facilities in the construction sector.-----

25) Research and Development of Technology and Engineering [72102]-----

Includes research and development efforts carried out in systematic, maintained by the private sector, related to technology and engineering. Activities covered in this group include research and development of engineering and technology, as well as between branches of science, especially science natural knowledge and engineering.-----

c. Carrying out Repair, Fabrication, Machine Installation/Installation and Construction Equipment, such as:-----

1) Telecommunication Installation [43212]-----

Includes the installation of telecommunication installations on buildings for both residential and non-residential, such as antenna installation. This group also includes activities installation, maintenance and repair of telecommunication installations in telephone/telegraph centers, microwave radar transmitting stations small earth stations/satellite stations and the like. Including the installation of transmission and telecommunication networks and telecommunication installations in buildings and civil buildings.-----

2) Sea, River, and Air Navigation Construction Installation Services [43214]-----

Includes installation and maintenance of construction and equipment related to sea, river and air navigation aids, telecommunications- shipping/aviation, hydrography and meteorology, crossing channels, guidance, for the sake of safety shipping and aviation.-----

3) Railway Signal and Telecommunication Installation [43215]-----

This group includes installation, maintenance and repair railway signal and telecommunication installations.-----

4) Installation of Highway Signals and Signs [43216]-----

Includes installation, maintenance and repair of signal installations and

highway signs. Including the installation of road fixtures and/or road signs, road markings, bridge markings, including reflectors, delimiters, road signs, directional posts, kilometer posts, hectometer posts, precast kerbs, concrete medians, guardrails, and other similar equipment.-----

5) Other Construction Installations ytdl [43299]-----

Includes the installation of other building installations and activities----- installation, maintenance and repair of civil building installations----- other which are not covered by heading 43291 to 43294. Including the installation and maintenance of facilities mining and manufacturing installations such as loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blasts furnaces and coke ovens; Installation of treatment systems and- equipment for purifying seawater, brackish water, and freshwater into pure water at power plants.-----

6) Installation of Foundations and Piles [43901]-----

Includes special activities for the installation of various foundations and columns piles include concrete casting and foundation ironing for----- buildings, roads/bridges, irrigation buildings, docks, buildings----- offshore and the like as part of the work that is covered in the construction of residential and non-residential buildings and other civil buildings.-----

7) Construction Equipment Rental with Operator [43905]-----

Includes the business of renting construction tools or machinery and----- equipment with the operator. Including the rental of production and operational equipment for oil, gas, petrochemicals, geothermal, communications such as SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), and crane rental.-----

8) Other Special Construction Ytdl [43909]-----

Covers other special construction activities that have not yet been completed classified in classes 43901 through 43905 that require specialized skills or equipment, such as work moisture and water

retention, building dehumidification, shaft sinking, chimney and oven installation for industrial purposes and jobs that require climbing skills and the use of related equipment, e.g. working on buildings. Including subsurface work, concrete pavement layer work; asphalt pavement work; granular pavement work; construction work drilling and pressurized cement injection; concrete work of structures; work post-tensioned concrete construction; construction work waterproofing of water, oil, gas and other similar storage tanks; as well as the installation of fireproof construction (kiln, angearing, flare, incinerator) for residential and non-residential buildings as well as other civil buildings.-----

9) Laboratory Testing Services [71202]-----

Includes physical, chemical, biological, electrical, mechanical and other analysis of all types of materials and products that includes testing activities in the field of food health, including tests animal diseases and controls related to the production of food; Austic and vibration (vibration) test, composition and purity test minerals and so on, physical characteristics and performance tests of materials such as strength, thickness, durability, radioactivity and etc., qualification and durability tests, performance tests of overall machinery such as motors, automobiles, electronic equipment, telecommunication device testing, construction sector laboratory testing, etc., failure analysis, environmental indicator tests and measurements such as air and water pollution, tests using models or mockups such as airplanes, ships, dams and others.-----

Including police laboratory operational activities and assessment of the suitability of the quality test of the warehouse receipt system.-----

10) Installation Engineering Inspection Services [71204]-----

Includes the inspection of an installation design and process-----
installations, for example inspection of electrical power installations, and other installations-----

- d. Conducting Rental and Service Provision Business in the Field of Equipment-Construction, such as:-----
- 1) Scaffolding Installation (Steiger) [43902]-----
Includes special activities for the installation of scaffolding/steiger on---- buildings, roads/bridges, irrigation buildings, piers and the like.-----
 - 2) Rental and Lease Activities Without Machine Option Rights and-----
Construction Equipment and Civil Engineering [77393]-----
Includes leasing and leasing activities without option rights-----
(operational leasing) of construction and civil engineering machinery and equipment including its equipment without its operator, such as cranes (cranelorries), ladders and work platforms (scaffolds and work--- platforms) excluding their installation and erection and the like.-----
- e. Planning, Implementation, Management, Sales, Purchasing, Rent, Lease and Trade Expedition Services/Land and Sea Transportation Business, such as:----
- 1) Motor Transportation for General Goods [49431]-----
Covering the operation of freight transportation with motorized vehicles and can transport more than one type of goods, such as transport by truck, pick-up, open tub and closed tub (box).-----
 - 2) Motorized Transportation for Special Goods [49432]-----
Covering the operation of freight transportation with motorized vehicles for goods that specifically transport one type of goods,--- such as freight fuel oil, petroleum, processed products, LPG, LNG and CNG, transportation of dangerous goods, waste materials hazardous and toxic, transportation of heavy equipment goods, transportation of containers, transportation of live plants, transportation of live animals and transportation of motor vehicles.-----
 - 3) Domestic Sea Transportation for General Goods [50131]-----
Covers the business of transporting general goods by sea by Using ships between domestic ports by sailing routes regularly and regularly (liner) on a schedule, or irregular and irregular routes (tramper). Including

businesses sea transportation rentals and their operators.-----

4) Domestic Sea Transportation for Special Goods [50133]-----

This group includes businesses transporting goods with using a ship that is specifically designed to transport a certain type of goods, such as the transportation of goods hazardous, hazardous and toxic waste, fuel oil, petroleum, processed products, LPG, LNG and CNG, fish and the like. Including the sea transportation rental business and its operators.-----

5) River and Lake Transportation for General Goods and or Animals [50221]-----

Covers the business of transporting goods on rivers and lakes, and goods transported can be more than one type, except for dangerous goods, special goods or heavy equipment.-----

6) River and Lake Transportation for Special Goods [50222]-----

Covering the business of transporting goods on rivers and lakes by ship-- or a specially modified cargo boat only transporting one type of goods, including vessels that meet technical/feasibility requirements, in accordance with the special goods that are transported and classified as follows, namely timber transportation logs, pipe/iron/rail transportation, freight transportation bulk, liquid freight transportation, transportation of goods in need refrigeration facilities, container transportation, transportation of heavy equipment and transportation other special items.-

7) Inter-Provincial Public Crossing Transportation for Goods [50224]-----

Covering the business of transporting goods from one province to another by using a crossing boat that is tied in the route.-----

8) Inter-Provincial Pioneer Crossing Transportation for Goods [50225]-----

Covering the business of transporting crossings in the sea, lakes, straits--- and inter-provincial bays for goods that connect regions remote areas and potential areas but not yet developed and not yet profitable to be navigated in a commercial way to areas that have developed. Including the business crossing transportation rental and its operators.-----

- 9) Sea Port Service Activities [52221]-----
 Covering seaport service business activities, which related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo in cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation emitters), shipping and activities berthing, mooring services, guidance and towing services.-----
- 10) Crossing Port Service Activities [52223]-----
 Includes business activities for the implementation of crossing ports.-----
 Includes activities related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of facilities such as ports and docks, navigation, inspection cargo in cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation emitters), shipping and berthing activities, mooring services, guidance services and delays.-----
- 11) Transportation Management Services (JPT) [52291]-----
 Includes the business of shipping and/or packing goods in-----
 large volumes, through rail transportation, land transportation, transportation-- sea transportation and air transportation-----
- 12) Railway Cargo Expedition Activities and Land Transportation Expeditions (EMKA & EAD) [52292]-----
 Includes the business of shipping and/or packing goods in large volumes, both transported by train and equipment land transportation.-----
- 13) Ship Cargo Expedition Activities (EMKL) [52293]-----
 Includes the business of shipping and/or packing goods in large volume, which is transported by sea freight.-----
- f. Treatment and Disposal of Hazardous Waste [38220]-----
 Includes treatment and disposal efforts managed by both the government and the private sector such as the disposal and treatment of hazardous solid waste or non-solid waste and specific wastes, including materials explosive,

oxidized, flammable, toxic, irritant, carcinogenic, corrosive or materials that can cause infections and other harmful substances and preparations to human health and the environment. Its activities are the business operation of facilities for the disposal of hazardous waste and garbage specific, treatment and disposal of toxic live or dead animals and other contaminated wastes, incineration of hazardous waste, treatment, disposal and storage of radioactive waste, such as treatment and disposal of transitional radioactive waste, including disposal at the time/period of waste disposal and packaging, preparation and other treatments against radioactive waste.-----

g. Self-Owned or Rented Real Estate [68111]-----

Includes the business of buying, selling, leasing and operating real estate--- both owned and leased, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (such as exhibition halls, personal storage facilities, malls, shopping malls and others) as well as the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for permanent use, either on a monthly or yearly basis. Including land sale activities, development of buildings for-- self-operated (for the rental of spaces in the building), division of real estate into land without land development and operation of residential areas for houses that can be moved moved-----

h. Head Office Activities [70100]-----

Includes supervision and management of other corporate units or- enterprises; Strategic or organizational planning and decision-making of company or enterprise regulations. The units in this group control the implementation operations and manage the operations of the related units. Activities included in this group including head offices, central administrative offices, legal offices, district and regional offices and branch management offices.-----

i. Research and Development of Natural Sciences and Technology Other Engineering [72109]-----

It includes research and development efforts that are carried out regularly (systematically), organized by the private sector, related to technology -- and

other engineering.-----

j. Market Research [73201]-----

It includes research efforts on market potential, product acceptance in the market, consumer habits and behaviors, in relation to promotion sales and development of new products.-----

----- **CAPITAL** -----

----- **Article 4** -----

1. The Company's authorized capital amounted to IDR 2,668,000,000,000 (two trillion six hundred and sixty-eight billion Rupiah) divided into 26,680,000,000 (twenty-six billion six hundred and eighty million) shares, each share with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah).-----
2. From the authorized capital, a total of 8,715,466,600 has been issued and paid (eight billion seven hundred and fifteen million four hundred sixty-six thousand six hundred) shares or with a nominal value of Rp871,546,660,000,- (eight hundred seventy-one billion five hundred and forty-six million six hundred and sixty thousand Rupiah) by the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company.-----
3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of each issued share and paid above, or the whole of Rp.871,546,660,000,- (eight hundred seventy-one billion five hundred and forty-six million six hundred and sixty thousand Rupiah) has been paid by the Company's Shareholders and is a deposit of the Company's old age, as stated in Deed Number: 33 dated 23-07-2020----- (two (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 07-08-2020 (seven August years two thousand twenty) Number: AHU-0129568. AH.01.11.;
4. Shares that are still in deposit will be issued by the Board of Directors according to the Company's capital needs at the time, procedures, prices, and requirements specified by determined by the Board of Directors Meeting to subsequently obtain approval General Meeting of Shareholders ("GMS"). GMS can delegate authority

regarding its implementation to the Board of Directors or the Board of Commissioners, by taking into account the provisions of the Articles of Association and the regulations in the Capital Market field.

5. Deposits on shares can be made in the form of money or in other forms-----
in addition to money and/or in the form of collection rights. The deposit must meet the capital Market regulations and other laws regulating deposit. The increase in paid-up capital becomes effective after the occurrence of deposit, without prejudice to the Company's obligation to take care of notification to the Minister in the field of Law.-----
6. Deposit of shares in other forms other than money with the condition that next:-----
 - a. The object to be used as a capital deposit must be announced to the public at the time of the invitation of the GMS regarding the deposit.-----
 - b. Objects used as capital deposits must be valued by the Appraiser who registered with the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the Financial Services Authority "OJK") and is not guaranteed in any way.-----
 - c. Obtaining the approval of the GMS with the quorum as stipulated in articles of Association. -----
 - d. In the event that the object is used as a capital deposit in the form of shares of the company listed on the Stock Exchange, the price must be determined based on fair market value. -----
 - e. In the event that the deposit comes from retained earnings, share agio, net profit the company, and/or its own capital elements, then retained earnings, stock agio, profit net of the Company, and/or other elements of its own capital have been in the last Annual Financial Statement that has been examined by the Accountant who are registered with the OJK. -----
 - f. In the event of depositing shares in the form of billing rights to the Company that compensated as a share deposit, the billing rights must have been loaded in the Company's last financial statements that have been audited by the Accountant. -----
 - g. In the event that the deposit of shares in the form of immovable objects is

mandatory approved in advance by the GMS as specified in Article 73 and Article 74 of the UUPT and announced in 2 (two) daily newspapers in the language Indonesia, one of which is published or circulated at the Company's place of residence and others circulated nationally at least 14 (fourteen) days before date of the GMS regarding the deposit.-----

7. The Company may increase capital through the issuance of shares and/or other Equity Securities either convertible into shares or granting the right to purchase shares, by granting the Right to Pre-Order Securities First Persons (hereinafter referred to as "Pre-emptive Rights"), which is a right that transferable, to each shareholder according to a certain ratio to the percentage of its share ownership, and is obliged to announce information regarding the capital increase plan by granting pre-emptive rights to shareholders no later than the announcement of the GMS through at least 1 (one) Indonesian-language newspaper in national circulation or the Exchange's Website and the Company's Website whose contents comply with the principles of principles regulated in the Capital Market.-----
8. Obligation to provide pre-emptive rights in the issuance of shares and/or securities of other equity as intended in paragraph 7 of this Article shall not apply if the Company increases capital through the issuance of shares and/or other equity securities in the frame:-----
 - a. Improvement of financial position;-----
 - b. In addition to improving the financial position;-----
 - c. Issuance of Bonus Shares:-----
 - 1) is a Stock Dividend as a result of the Profit Balance which capitalized into capital; and/or-----
 - 2) is not a Stock Dividend as a result of the stock agio or the other equity that is capitalized into capital.-----
9.
 - a. Capital increase in the context of improving the financial position, depositing-- Shares in any form other than money cannot be done.-----
 - b. In the event that the deposit of shares is made in other forms other than money, it is mandatory meet the following conditions:-----

- 1) Directly related to the plan to use funds;-----
 - 2) Using an appraiser to determine the fair value of any form other than money used for deposits and the fairness of transactions deposits on shares in other forms other than money; and-----
 - 3) Not being pledged in any way.-----
 - c. In the event of depositing shares in the form of billing rights to the Company that compensated as a share deposit, the billing rights must have been loaded -- in the Company's last financial statements that have been audited by the Accountant.-----
10. Equity Securities Expenditure;
- Any capital increase through the issuance of Equity Securities (Equity is a Stock, a Securities that can be exchanged for shares or Securities that contains the right to acquire shares from the Company as the issuer), carried out by: -----
- a. providing pre-emptive rights, namely rights attached to the shares that provide the opportunity of the shareholder concerned to purchase shares and/or other equity securities that can be converted into shares or granting the right to purchase shares, before being offered to other parties.
 - b. issuance of shares/capital increase with or without pre-emptive rights carried out with the approval of the GMS and in accordance with the provisions in the field of Market Capital.
 - c. the implementation of the issuance of shares in the portfolio for holders of Securities who can exchanged for shares or Securities containing the right to acquire shares, which can be exercised by the Board of Directors based on the Company's previous GMS which has approved the issuance of the Securities.
 - d. The Company is required to conduct an allocation of shares and/or Equity Securities other unbooked at the same booking price to all shareholders---- who express interest in purchasing additional shares and/or other Equity Securities during the Pre-emptive Rights exercise period Intended.-----
 - e. The pre-emptive rights can be sold and transferred to other parties, by heeding the provisions of the Articles of Association and laws and regulations which

applies in the field of Capital Market in Indonesia.

- f. In the event that there are still remaining Equity Securities that are not taken by the shareholders as referred to in point d above, then if there is a standby buyer, the Equity Securities must be allocated to certain parties who act as standby buyers at the price and the same conditions.
 - g. If the Company intends to increase the capital that is used the funds are used to make transactions with a certain value that has been stipulated, in the capital increase in question, there must be a standby buyer which guarantees to purchase the remaining shares and/or other Equity Securities lowest offering price for shares and/or Equity Securities other pre-emptive rights holders.
 - h. The increase in paid-up capital becomes effective after the occurrence of deposits and the issued shares have the same rights as the have the same classification issued by the Company with no reduce the Company's obligation to take care of notifications to the Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.-----
 - i. Issuance of Equity Securities/Capital Increase without Providing-----
Pre-emptive rights, can be done in terms of the issuance of shares:-----
 - 1) Addressed to the Company's employees; and/or-----
Addressed to holders of bonds or other convertible securities-----
 - 2) into shares, which have been issued with the approval of the GMS;
and/or-----
 - 3) Carried out in the context of reorganization and/or restructuring that has
been approved by the GMS; and/or-----
 - 4) Carried out in accordance with the regulations in the field of Capital
Market which allowing capital increase without pre-emptive rights.-----
11. Increase in authorized capital resulting in a comparison between-----
issued and paid-up against the authorized capital to be less than 25% (twenty-----
five percent) can be carried out as long as: -----
- a. Has obtained the approval of the GMS to increase the authorized capital;-----

- b. Amendments to the Articles of Association regarding the increase in the authorized capital has received the approval of the Minister of Law and Human Rights;-----
- c. Capital increase is placed/paid-up so that it becomes at least 25%----- (twenty-five percent) of the authorized capital must be carried out within a period of no later than 6 (six) months after the amendment of the Articles of Association in question in letter b of this paragraph has received approval from the Minister of Law and Human Rights Human;-----
- d. In the event of an increase in paid-up capital as intended in letter c paragraph-- is not fully fulfilled, then the Company is obliged to change the ----- The Articles of Association within 2 (two) months after the ----- as referred to in letter c of this paragraph is not fulfilled;-----
- e. Approval of the GMS as intended in Article 4 paragraph (9) letter a ----- including to amend the Articles of Association as referred to in the ----- letter d of this verse.-----

----- STOCKS -----

----- Article 5 -----

1. All shares issued by the Company are shares in the name of and ----- issued on behalf of its owner registered in the Register of Shareholders----- Company. -----
2. Every 1 (one) share gives 1 (one) voting right. -----
3. The Company only recognizes one or 1 (one) legal entity as the owner of the----- 1 (one) share, namely a person or legal entity whose name is recorded as----- the shareholder concerned in the Company's Register of Shareholders. -----
4. If 1 (one) or more shares for any reason belong to several ----- people, then those who have it together are obliged to appoint----- in writing one of them or another as their authority----- together and only the person appointed or authorized is the name ----- recorded in the Register of Shareholders of the Company and persons appointed or -- This authorized shall be deemed to be the rightful holder of the shares in question----

- and have the right to exercise the rights granted by law to the shares. -----
5. As long as the provisions in paragraph 3 above have not been implemented, then the Holders
- The shares are not entitled to vote in the GMS, while -----
- Dividend payments for the shares were suspended.-----
6. Every Shareholder by law shall be subject to the Articles of Association and -----
- to all decisions taken legally in the GMS as well as regulations -----
- applicable laws.
7. For the Company's shares listed on the stock exchange, the stock exchange regulations apply
- in the place where the shares are listed.-----

----- **SHARE LETTERS** -----

----- **Article 6** -----

1. Proof of share ownership is as follows:
- a. in the event that the Company's shares are not included in the Collective Custody at the Settlement and Depository Institution, the Company is obliged to provide proof of share ownership in the form of share certificates or collective share letters to its shareholders.-----
- b. in the event that the Company's shares are included in the Collective Custody at the Settlement and Depository Institution, the Company is obliged to issue a certificate or written confirmation to the Settlement and Depository Institution as proof of recording in the Company's register of shareholders.-----
2. The Company can issue share certificates.-----
3. If a share certificate is issued, then for each share is given a letter stock. -----
4. Share collective letter can be issued as proof of ownership of 2 (two) or more -----
- shares owned by a Shareholder.-----
5. The share certificate must at least include: -----
- a. Name and address of the Shareholder;-----
- b. Share certificate number;-----
- c. Stock number;-----

- d. Number of shares;-----
- e. The par value of the shares.-----
- 6. In the share collective letter, at least the following must be included:-----
 - a. Name and address of the Shareholder;-----
 - b. Number of the share collectible;-----
 - c. Stock number;-----
 - d. Number of shares;-----
 - e. The nominal value of the shares; and-----
 - f. Date of issuance of the share collective letter.-----
- 7. Each share certificate and/or collective share letter must be printed in accordance with the
 applicable laws and regulations in the field of Capital Market and-----
 signed by a member of the Board of Directors who has the right to represent the Board of Directors or a sign
 The hand is printed directly on the share certificate or share collective letter that-----
 Concerned.-----
- 8. The provisions of paragraph 6 above are mutatis mutandis also applicable to printing and
 signing of similar Equity Securities.
- 9. For shares included in the Collective Custody at the Depository-----
 and Settlement or at the Custodian Bank (Specifically in the context of investment contracts
 collective), may also be issued in the form of a certificate or written confirmation that
 signed by a member of the Board of Directors who has the right to represent the Board of Directors or signature is printed directly on the certificate or written confirmation.
- 10. Written confirmation issued by the Board of Directors for the shares included in the Collective Custody must at least include:-----
 - a. Name and address of the Depository and Settlement Institution or Bank-----

The custodian who carries out the Collective Custody concerned; -----

b. Date of issuance of written confirmation; -----

c. The number of shares covered by the written confirmation; -----

d. The amount of the nominal value of the shares covered in the written confirmation;

e. Provision that each share in a Collective Custody with a classification ----- the same, is commensurate and interchangeable between each other. -----

Other. -----

11. All share certificates and/or collective shares issued by the Company can be secured by following the laws and regulations in the field of Capital Market and the Limited Liability Company Law.

----- **REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES** -----

----- **Article 7** -----

1. In the event that the share certificate is damaged, the replacement of the share certificate can be done if:

a. The party who submits a written application for the replacement of shares is --- the owner of the share certificate; -----

b. The Company has received the damaged share certificates; and -----

c. The Company is obliged to destroy the original damaged share certificates after

provide replacement of share certificates whose number is the same as the number

original share certificates. -----

2. In the event that the share certificate is lost, the replacement of the share certificate can be carried out

if: -----

a. The party applying for the replacement of shares is the owner of the ----- the shares; -----

b. The Company has obtained evidence from the Indonesian National Police for --- the loss of the share certificates; -----

- c. The party applying for the replacement of shares provides a guarantee -----
which is deemed sufficient by the Board of Directors; and -----
- d. The plan to issue replacement for the lost share certificates has been announced
in the
Stock Exchange where the Company's shares are listed in the latest time -----
No later than 14 (fourteen) days before the issuance of the replacement share
certificates.
- 3. The cost of the replacement of the share certificate must be borne by -----
Shareholders concerned.
- 4. Substitute expenses for a share certificate, according to this article resulting in -----
The original letter becomes void and no longer valid. -----
- 5. The provisions in this Article 7, mutatis mutandis also apply to the expenditure of ---
a substitute for a share collective letter or a substitute for a Confirmation of Share
Listing.

----- **REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER** -----

----- **Article 8** -----

- 1. The Company is obliged to hold and maintain the Register of Shareholders -----
Shares and Special Register at the Company's place of residence. -----
- 2. In the Register of Shareholders, it is recorded: -----
 - a. Names and addresses of the Shareholders; -----
 - b. Number, number and date of acquisition of share certificates and collective
letters of shares
owned by the Shareholders;
 - c. The amount paid up for each share; -----
 - d. Name and address of the person or legal entity that has the right to lien -----
shares or fiduciary guarantors on the shares and the date of acquisition of rights-
pawn or the date of registration of the fiduciary deed; -----
 - e. Information on the deposit of shares in other forms other than money; -----
 - f. Changes in share ownership, if any; and -----
 - g. Other information deemed necessary by the Board of Directors and/or required

by the
applicable laws.

3. In the Special List, information about the member's share ownership is recorded -----
The Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the
Company and/or in the
other companies and the date the shares were acquired. -----
4. Shareholders must notify each change of residence by-----
letter to the Company's Board of Directors or a valid proxy of the Board of Directors
(such as the Bureau of
Securities Administration appointed by the Board of Directors). As long as the
notification has not
is made, then all summonses and notices to the Shareholders -----
is valid if addressed at the address of the last Shareholder recorded -----
in the Register of Shareholders. -----
5. The Board of Directors is obliged to keep and maintain the register of Shareholders --
and a special list as best as possible.-----
6. Listing and/or changes to the Register of Shareholders must be approved by -----
written by members of the Board of Directors who have the right to represent the
Board of Directors or their proxies who-----
legitimate. -----
7. At the request of the Shareholder concerned or the pawnbroker or-----
recipient of a fiduciary guarantee, a lien of shares or a fiduciary guarantee shall be
noted
in the Register of Shareholders in the manner determined by the Board of Directors --
based on satisfactory evidence acceptable to the Board of Directors regarding -----
pawn or fiduciary guarantee on the shares concerned. Acknowledgment of-----
share pledge by the Company as required in article 1153 of the-----
The Civil Law is only evident from the recording of the pawn -----
in the Register of Shareholders. -----
8. Any registration and listing in the Register of Shareholders includes -----

recording of a sale, transfer, collateral, pawn,-----
fiduciary, cessie concerning shares or rights or interests in shares must-----
in accordance with the provisions of the Articles of Association and for the
registered shares

on the Stock Exchange shall apply the regulations of the Stock Exchange and the
laws and regulations in the

Capital Market field. -----

9. Each Shareholder has the right to view the list of Shareholders and a special register -
related to the Shareholders concerned at the time of the -----
the Company's office work. -----

----- **COLLECTIVE COLLECTION** -----

----- **Article 9** -----

1. Shares in Collective Custody in Depository and Settlement Institutions -----

must be recorded in the Register of Shareholders of the Company on behalf of the
Institution

Storage and Settlement for the benefit of account holders on -----
Storage and Settlement Institutions.

2. Shares in Collective Custody in Custodial Banks or Securities Companies -----

recorded in the securities account at the Depository and settlement recorded -----
on behalf of the Custodian Bank or the Securities Company concerned to -----
interests of securities account holders in Custodial banks or Securities Companies ----
aforementioned. -----

3. If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank are part of the -----

from the mutual fund securities portfolio in the form of collective investment
contracts and not

included in Collective Custody at the Depository and Settlement institution, -----

then the Company will list the shares in the Register of Shareholders -----

on behalf of the Custodian Bank for the benefit of the owner of the Participation Unit
of the mutual

funds in the form of collective investment contracts. -----

4. The Company is obliged to issue a certificate or written confirmation to the Institution
Depository and Settlement or Custodian Bank as proof of recording-----
in the register of Shareholders. -----
5. The Company is obliged to mutate shares in the Collective Custody registered on the name of the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank for mutual funds
funds in the form of collective investment contracts in the list of Shareholders shall be
on behalf of a party appointed by the Depository and Settlement Institution or-----
The Custodian Bank is referred to. Mutation applications submitted by the-----
Depository and Settlement or Custodian Bank to the Company or Bureau -----
Securities Administration appointed by the Company. -----
6. Depository and Settlement Institutions, Custodian Banks or Securities Companies----
It is mandatory to issue a confirmation to the account holder as proof -----
Recording in securities accounts. -----
7. In the Collective Custody of each share issued by the Company of type and-----
The same classification is commensurate and interchangeable between one and the other.
other.
8. The Company is obliged to refuse to list shares in the Collective Custody, if-----
The share certificate is lost or destroyed, unless the party requesting the mutation----
can provide sufficient evidence and/or assurance that the party -----
as a Shareholder and the share certificate is -----
is really lost or destroyed. -----
9. The Company is obliged to refuse to list shares in the Collective Custody, if-----
The shares are pledged, placed in confiscation based on a court determination -----
or confiscated for examination of criminal offenses. -----
10. Holders of securities accounts whose shares are listed in the Collective Custody are entitled to

- vote in the GMS, according to the number of shares it owns -----
- on the account. Securities account holders who have the right to vote -----
- in the GMS is the party whose name is recorded as the holder of the securities account
- at the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank 1 (one) day -----
- work before the invitation of the GMS. -----
11. Custodian Banks and Securities Companies are required to submit a list of holders' names
- securities account along with the number of shares of the Company owned by each --
- account holders at the Custodian Bank and the Securities Company to -----
- The Depository and Settlement Institution shall be subsequently submitted to the ----
- The Company shall not hesitate to submit a notice to the -----
- registered in the Register of Shareholders specifically provided for -----
- holding the GMS.
12. The investment manager has the right to attend and vote at the GMS on the shares----
- The Company is included in the Collective Custody at the Custodian Bank that -----
- is part of a portfolio of mutual fund securities in the form of investment contracts-----
- collective and is not included in the Collective Custody at the Depository -----
- and Settlement with the provision that the Custodian Bank is obliged to -----
- submit the name of the Investment Manager no later than 1 (one) working day -----
- before the GMS. -----
13. The Company is obliged to submit dividends, bonus shares or other rights in connection with the
- with share ownership to the Depository and Settlement Board on -----
- shares in Collective Custody in Depository and Settlement Institutions-----
- concerned and subsequently the Depository and Settlement Board -----
- hand over dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Bank and -----
- to the Securities Company for the benefit of each Shareholder in the -----
- Custodian Banks and Securities Companies. -----
14. The Company is obliged to submit dividends, bonus shares or other rights in

connection with

with the ownership of shares to the Custodian Bank over shares in the Custody -----

Collectives in Custodian Banks that are part of a mutual securities portfolio -----

funds in the form of collective investment contracts and are not included in the Custody

Collective on the Institution of Storage and Settlement. -----

15. Deadline for determining the securities account holders who are entitled to obtain ----

dividends, bonus shares or other rights in respect of stock ownership-----

in the Collective Custody shall be determined by the GMS with the provision that the Bank

Custodians and Securities Companies are required to submit a list of names of holders

securities account along with the number of shares of the Company owned by each --

securities account holder to the Depository and Settlement Institution -----

to be submitted to the Company no later than 1 (one) working day-----

after the date of the GMS which is the basis for determining the Shareholders who are entitled to

to obtain dividends, bonus shares or other rights.-----

16. Provisions regarding Collective Custody are subject to laws and regulations -----

and applicable regulations in the field of Capital Market as well as the provisions of the Stock Exchange in

territory of the Republic of Indonesia where the Company's shares are listed. -----

----- **TRANSFER OF SHARE RIGHTS** -----

----- **Article 10** -----

1. In the event of a change in ownership of a share, the original ownership of the stock

is recorded

in the Register of Shareholders must still be considered as Shareholders -----

until the name of the new owner has been recorded in the Register of Shareholders---

The Company, one and the other without prejudice to the permission of the authorities and

- applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association-----
and the stock exchange where the Company's shares are listed. -----
2. The transfer of rights to shares must be based on the deed of transfer of rights that----
signed by the transferor and the transferee or representative-----
legitimate ones. -----
 3. The deed of transfer of rights as referred to in paragraph 2 must be in the form of----
as determined or approved by the Board of Directors and a copy thereof is submitted
to the Company with the provision that the form and procedure for the transfer of
rights to
shares listed on the Stock Exchange must comply with the regulations applicable to
the
Stock Exchange at the place where the shares are listed. -----
 4. Transfer of rights to shares included in the Collective Custody-----
by transferring books from one securities account to another securities account at the
institution
Depository and Settlement of Custodial Banks and Securities Companies.-----
 5. The transfer of rights to shares is only allowed if all the provisions in the-----
The Articles of Association have been fulfilled. -----
 6. The transfer of rights is recorded well in the register of the Shareholders concerned --
or on the share certificate, the note must be signed by a member of the Board of
Directors
who have the right to represent the Board of Directors or their legal representatives.--
 7. The Board of Directors by giving reasons for it, may refuse to register -----
transfer of rights to shares in the Register of Shareholders if the means -----
determined by the Board of Directors is not fulfilled or if any of the requirements in
the
The transfer of shares was not fulfilled. -----
 8. If the Board of Directors refuses to register the transfer of rights to shares, then -----
The Board of Directors is obliged to send a notice of rejection to the party who will --
transfer their rights within 30 (thirty) days after the date of application-----

- for registration is accepted by the Board of Directors. -----
9. Regarding the Company's shares listed on the Stock Exchange, any refusal to-----
note that the transfer of rights to the shares in question must be in accordance with
the
which applies to the Stock Exchange at the place where the shares are listed. -----
10. The Register of Shareholders must be closed on the last business day before the date
of the
summons to the GMS, in the event of a re-summoning or error, then -----
recording date should change to 1 business day after the date of the Call error-----
GMS to determine the names of the Shareholders who are entitled to attend the -----
The meeting in question. -----
11. A person who acquires the right to shares as a result of the death of a Holder -----
shares or for any other reason that causes the ownership of a stock to switch -----
According to the law, by submitting proof of rights as at any time -----
required by the Board of Directors to submit a written application for -----
registered as a Shareholder.
- Registration can only be done if the Board of Directors can receive good
evidence
rights, by taking into account the provisions in the Articles of Association, the --
Applicable laws and regulations in the field of insurance and -----
Capital Market in Indonesia. -----
12. All restrictions, prohibitions and provisions in the Articles of Association governing
the right to transfer the rights to the shares and the registration of the transfer of the
rights to the
Shares must also apply mutatis mutandis to each transfer of rights -----
according to paragraph 11 of this article. -----
13. Transfer of rights to shares listed on the Stock Exchange in Indonesia and/or shares --
traded on the Capital Market, carried out in accordance with the provisions of the ----
Laws and regulations applicable in the field of Capital Market in Indonesia -----
and the provisions of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. ----

14. Shareholders who request to hold a GMS, and request-----
the GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or
determined
by the court, it is mandatory not to transfer its share ownership within the term-----
at least 6 (six) months since the GMS was held.-----

----- **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** -----

----- **Article 11** -----

1. The General Meeting of Shareholders in the Company is: -----
a. Annual General Meeting of Shareholders, as referred to in-----
Article 12.-----
b. Other General Meetings of Shareholders, namely the General Meeting of
Shareholders-----
held from time to time on a need-to-know basis as arranged-----
in Article 13. -----
2. What is meant by the "General Meeting of Shareholders" or "GMS" in -----
This Articles of Association means both the "Annual General Meeting of
Shareholders" and the-----
"Other General Meetings of Shareholders", unless expressly stated otherwise. -----
3. In addition to the implementation of the GMS as referred to in the Service Authority
Regulation-----
Finance regarding the plan and implementation of the GMS of Public Companies,----
The Company may conduct the GMS electronically (hereinafter referred to as the ----
"Electronic GMS"). What is meant by Electronic GMS is the implementation of
GMS-----
by the Company by using teleconference media, video conferences, or-----
other electronic media facilities. -----
4. The Company can conduct Electronic GMS by using e-GMS -----
Prepared by: -----
a. Depository and Settlement Institution appointed by the Service Authority -----
Finance; -----

- b. An e-GMS provider approved by the Financial Services Authority in the form of a body -----
Indonesian law and domiciled in the territory of the Unitary State of the Republic-----
Indonesia; or-----
 - c. Company-----
as specifically regulated in the Capital Market regulations.-----
5. In the event that the Electronic GMS is held by the party as mentioned-----
In paragraph 4 letters b and c, the party must be connected to the Institution -----
Depository and Settlement of securities administration bureau to ensure -----
shareholders who are entitled to attend the GMS. -----
6. The Board of Directors shall hold the Annual GMS and other GMS. GMS can -----
held at the request of shareholders or the Board of Commissioners with -----
Paying attention to the provisions in paragraph (6) letter a of this paragraph.-----
7. Request for the Holding of GMS by Shareholders.-----
 - a. The holding of the GMS can be carried out upon request:-----
 - 1) Request of one or more Shareholders who are jointly -----
represents 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares-----
with valid voting rights.-----
 - 2) Board of Commissioners.-----
 - b. The request for the holding of the GMS in letter a is submitted to the Board of Directors -----
with a registered letter accompanied by the reason. -----
 - c. Registered letters submitted by shareholders to -----
Board of Commissioners.-----
 - d. Request for the holding of the GMS as intended in paragraph (6)-----
Based on the judgment of the Board of Directors, it must: -----
 - 1) done in good faith;-----
 - 2) considering the interests of the Company; -----
 - 3) is a request that requires a resolution of the GMS;

- 4) accompanied by reasons and materials related to matters that must be decided in -----
GMS; -----
 - 5) not contrary to laws and regulations and the budget -----
this basis.-----
- e. The Board of Directors is obliged to announce the GMS to the shareholders at least-----
no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for-----
The GMS as referred to in letter a of this paragraph is accepted by the Board of Directors. -----
- f. The Board of Directors is required to submit a notification of the meeting agenda and a registered letter -----
as referred to in letter b of this paragraph from the shareholder or -----
The Board of Commissioners to the Financial Services Authority (OJK) no later than 5 (five)-----
the working day before the announcement as intended in letter e of this paragraph.-----
- g. In the event that the Board of Directors does not announce the GMS as intended
In letter e of this paragraph on the proposal of the shareholders as intended-----
in letter a points 1) and 2) of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for the holding of the GMS is received --
The Board of Directors, the Board of Directors is obliged to announce: -----
1) there is a request for the holding of a GMS from shareholders who-----
not organized; and -----
2) the reason for not holding the GMS. -----
- h. In the event that the Board of Directors has made an announcement as referred to in -----
letter g of this paragraph or a period of 15 (fifteen) days has been exceeded, ----
Shareholders can resubmit the request for the implementation of the-----
GMS to the Board of Commissioners.-----

- i. The Board of Commissioners is obliged to announce the GMS to the holders ---- shares no later than 15 (fifteen) days from the date of the request----- the holding of the GMS as referred to in letter h of this paragraph is accepted ---- Board of Commissioners.-----
- j. The Board of Commissioners is obliged to submit a notification of the meeting agenda to the ----- OJK no later than 5 (five) working days before the announcement as ----- is referred to in the letter j of this verse.-----
- k. In the event that the Board of Commissioners does not announce the GMS in ---- period of 15 (fifteen) days as intended in letter g, the ----- Commissioners are obliged to announce: -----
 - 1) there is a request for the holding of a GMS from shareholders----- as intended in letter a; and -----
 - 2) the reason for not holding the GMS. -----
- l. In the event that the Board of Commissioners has made an announcement as follows:----- referred to in letter k of this paragraph or a period of 15 (fifteen) days has ----- exceeded, shareholders can submit a request for the organization of the ----- GMS to the Chairman of the District Court whose jurisdiction includes ----- the Company's domicile to determine the granting of permits ----- The holding of the GMS as referred to in letter a points i and ii ----- this verse. -----
- m. Shareholders who have obtained a court determination to hold a GMS as referred to in letter l of this paragraph are obliged to hold a GMS.
- n. In the event that the Board of Directors does not make an announcement of the GMS as----- referred to in letter f of this paragraph on the proposal of the Board of Commissioners as ----- referred to in paragraph (6) a point iii of this paragraph, within a period of at least-----

- no later than 15 (fifteen) days from the date of the request -----
- The GMS is accepted by the Board of Directors, the Board of Directors is obliged to announce: -----
- 1) There is a request for the holding of a GMS from the Board of Commissioners which -----
not organized; and -----
 - 2) The reason for not holding the GMS. -----
- o. In the event that the Board of Directors has made an announcement as intended -
in letter n of this paragraph or a period of 15 (fifteen) days has been exceeded, --
The Board of Commissioners held its own GMS. -----
 - p. The Board of Commissioners is obliged to announce the GMS to the holders of
the -----
shares no later than 15 (fifteen) days from the date of announcement -----
as referred to in letter n of this paragraph or a period of 15 (fifteen) -----
The day referred to in letter o of this verse has been exceeded. -----
 - q. The Board of Commissioners is obliged to submit a notification of the meeting
agenda -----
to OJK no later than 5 (five) working days before the announcement -----
as referred to in letter p of this paragraph. -----
 - r. Procedures for holding GMS conducted by the Board of Directors as -----
referred to in letter e and letter f of this paragraph, the Board of Commissioners
as -----
referred to in letter i and letter p of this paragraph and the shareholders as -----
referred to in letter m this paragraph must be done in accordance with the
procedure -----
the holding of the GMS as stipulated in the OJK Regulation and -----
Articles of Association. -----
 - s. In addition to fulfilling the procedures of the GMS as intended in letter r of this
paragraph -----
The notice of the agenda of the GMS must also contain the following

information: -----

- 1) explanation that the GMS was held at the request of shareholders -----
and the name of the proposed shareholder and the amount of ownership-----
shares in the Company, if the Board of Directors or the Board of
Commissioners conducts a GMS at the request of shareholders; -----
- 2) convey the names of shareholders and the amount of ownership -----
shares in the Company and the determination of the chairman of the district
court regarding -----
granting permits for holding GMS, if GMS is held -----
shareholders in accordance with the determination of the Chairman of the
District Court to -----
holding GMS; or an explanation that the Board of Directors does not -----
conduct a GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board-
The commissioner conducts the GMS proposed by himself; or -----
- 3) explanation that the Board of Directors does not hold a GMS at the request
of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts
its own proposed GMS.

----- **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** -----

----- **Article 12** -----

1. The Annual GMS must be held every year, after the financial year ends -----
in accordance with the provisions of the law -----
2. In the Annual GMS: -----
 - a. The Board of Directors submits the Annual Report as intended in Article 24 ----
This Articles of Association; -----
 - b. The Board of Directors is obliged to submit a proposal for the use of the
Company's Net Profit, if -----
The Company has positive profits; -----
 - c. The appointment of a Public Accounting Firm registered with the OJK is
carried out-----
as proposed by the Board of Commissioners, to conduct an audit -----

on the Company's Financial Statements for the current year, including control audits-----

internal financial reporting; in accordance with the applicable provisions of the authority-----

capital market in the place where the Company's shares are registered and/or listed. -----

- d. The Board of Directors may propose other matters for the benefit of the Company in accordance with-----
with the provisions of this Articles of Association. -----

3. Approval of annual reports including ratification of financial statements and reports supervisory duties of the Board of Commissioners carried out by the GMS, means -- provide full repayment and release of responsibility to the -----
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been -----
carried out during the last financial year, to the extent that such actions are reflected in the-----
Annual reports and financial statements except for embezzlement, fraud -----
and other criminal acts. -----

4. Appointment and dismissal of public accountants and/or public accounting firms---- which will provide audit services on annual historical financial information -----
must be decided at the GMS, taking into account regulations in the field of Market - Capital. -----

----- **OTHER GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS** -----

----- **Article 13** -----

Other GMS may be held at any time based on the need for the interests of -----
Company.-----

----- **VENUES, NOTIFICATIONS, ANNOUNCEMENTS, SUMMONSES,** -----

AND THE TIMING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -

----- **Article 14** -----

1. The Company is obliged to determine the place and time of the GMS. -----

2. GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia, namely in: -----
 - a. The Company's place of residence;-----
 - b. The place where the Company conducts its main business activities;-----
 - c. Provincial capital where the place of residence or place of business activities ---
Company; or-----
 - d. Province where the Stock Exchange is located where the Company's shares are
listed.
3. In holding the GMS, the Company is obliged to comply with the provisions as-----
next:
 - a. Submit a notification of the meeting agenda to the OJK; -----
 - b. Announce the GMS to the Shareholders; and-----
 - c. Invite the GMS to the Shareholders. -----
4. Notification of GMS to OJK shall be carried out with the following provisions:-----
 - a. The Company is required to first submit a notification of the agenda -----
GMS to OJK no later than 5 (five) working days before the announcement -----
GMS by not taking into account the date of announcement of the GMS;-----
 - b. The agenda of the GMS as intended in letter a of this paragraph is mandatory---
expressed clearly and in detail;
 - c. In the event that there is a change in the agenda of the meeting as referred to in
the
letter b of this paragraph, the Company is obliged to submit changes to the
agenda of the meeting
referred to the OJK no later than the time of the convening of the GMS; -----
 - d. The provisions of letters a, b and c of this paragraph are mutatis mutandis
applicable
to:
 - 1) Notification of the holding of the GMS by shareholders who have -----
obtained a court determination to hold a GMS-----
as referred to in Article 11 paragraph 7 letter m.-----
 - 2) Notification of the holding of the GMS by the Board of Commissioners in

the event that

The Board of Commissioners held its own GMS as-----
referred to in Article 11 paragraph 7 letter o.-----

5. The announcement of the GMS shall be carried out with the following provisions: ---
- a. The Company is obliged to announce the GMS to shareholders -----
no later than 14 (fourteen) days before the invitation of the GMS, without -----
taking into account the date of the announcement and the date of the summons;
 - b. Announcement of the GMS as intended in letter a of this paragraph, at most-----
Underloading:
 - 1) provisions for shareholders who are entitled to attend the GMS; -----
 - 2) provisions for shareholders who have the right to propose meeting
agendas;
 - 3) the date of the GMS; and
 - 4) date of convening the GMS.
 - c. In the event that the GMS is held at the request of the shareholders or -----
The Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 7 in
addition to containing
the matter mentioned in letter b of this paragraph, the announcement of the
GMS as
referred to in letter a of this paragraph, it is mandatory to contain information
that the Company
to hold a GMS due to a request from shareholders or -----
Board of Commissioners;-----
 - d. In the event that the GMS is a GMS that is only attended by the Shareholders---
Independent, in addition to the information as referred to in letters b and c-----
This paragraph, in the announcement of the GMS, must also contain the
following information:
 - 1) The next GMS is planned to be held if the quorum-----
the presence of the required independent shareholders is not obtained -----
in the first GMS; and

- 2) Statement of the quorum of decisions required in each -----
meeting. -----
- e. Announcement of GMS that needs to be attended by Independent Shareholders-
carried out by following the provisions of regulations in the field of Capital
Market;
- f. Announcement of the GMS, to decide on transactions that contain conflicts ----
interests, carried out by following the regulations of the Capital Market; -----
- g. The provisions of letters a to f mutatis mutandis apply to-----
announcement of the holding of the GMS by shareholders who have-----
obtained a court determination to hold a GMS -----
as referred to in Article 11 paragraph 7 letter m. -----
6. Proposals for the agenda of the meeting can be carried out by the Shareholders with
the provision that
as follows:
 - a. Shareholders may propose the agenda of the meeting in writing to the -----
The organizer of the GMS no later than 7 (seven) days before the invitation of
the GMS;
 - b. Shareholders who can propose the agenda of the meeting as -----
The letter A is 1 (one) shareholder or more who -----
represents 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares-----
with voting rights. -----
 - c. The proposed agenda of the meeting as intended in letter a of this paragraph
must:
 - 1) Done in good faith;
 - 2) Considering the interests of the Company; -----
 - 3) Include the reasons and materials for the proposed agenda of the meeting;
and
 - 4) Not contrary to laws and regulations;-----
 - d. Proposed agenda of the meeting from the shareholders as referred to in -----
letter a is an agenda that requires a resolution of the GMS and -----

according to the assessment that the Board of Directors has fulfilled the requirements in letter c of this paragraph. -----

- e. The Company is required to include the proposed agenda of the meeting from shareholders

in the meeting agenda contained in the summons throughout the proposal of the
The meeting meeting meets the requirements as referred to in letters a to-----
with the letter d of this verse. -----

- 7. The invitation of the GMS shall be carried out with the following provisions: -----

- a. The Company is obliged to make a summons to the shareholders of the most----
no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS, -----
without taking into account the date of the summons and the date of the-----
the holding of the GMS;

- b. the invitation of the GMS as referred to in letter a at least - at least -----
Contains Information: -----

- 1) date of the GMS;
- 2) the time of the GMS;
- 3) the venue of the GMS;
- 4) provisions for shareholders who are entitled to attend the GMS; -----
- 5) the agenda of the meeting includes an explanation of each of the agendas; -
- 6) Information stating materials related to the meeting agenda are available
to
shareholders from the date of the invitation of the GMS to-----
with the GMS held which can be accessed and downloaded through -----
the Company's website and/or e-GMS; and-----
- 7) Information that shareholders can give power of attorney through e-----
GMS. -----

- c. Invitation of the GMS, to decide on conflicting transactions -----
interests, carried out by following regulations in the field of Capital Market; ---

- d. Without prejudice to any other provisions in this Articles of Association, the
summons

shall be carried out by the Board of Directors or the Board of Commissioners in a manner that

specified in this Articles of Association, taking into account the Market regulations

Capital; -----

- e. The provisions of letters a to d mutatis mutandis apply to -----
summoning the holding of the GMS by shareholders who have -----
obtained a court determination to hold a GMS -----
as referred to in Article 11 paragraph 7 letter m. -----

8. The second GMS is conducted with the following conditions:-----

- a. The second GMS must be held within a period of 10-----
(ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the GMS-----
the first is held;
- b. The invitation of the second GMS must be made within the latest period -----
7 (seven) days before the second GMS is held;-----
- c. In the invitation of the second GMS, it must be stated that the first GMS has ----
and did not reach the quorum of attendance. These terms apply -----
without prejudice to Capital Market regulations and laws and regulations -----
other regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;
- d. In the event that the Company does not conduct a second GMS within the
period of
as referred to in letter a of this paragraph, the Company is obliged to -----
GMS by fulfilling the provisions as intended in paragraph 3 of Article -----
Ini. -----

9. In the event that the second GMS has been held and does not reach a quorum -----
presence, the Company can conduct a third GMS, provided that -----
as follows:

- a. Convocation and implementation of the third GMS at the request of the
Company
determined by the OJK;-----

- b. The application as intended in letter a of this paragraph must be submitted-----
to OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS -----
Held;
 - c. The application as intended in letter b of this paragraph contains at least -----
little: -----
 - 1) Provisions of the quorum of the GMS as stipulated in the Articles of
Association
Company;-----
 - 2) List of shareholders present at the first and second GMS; -----
 - 3) List of shareholders who are entitled to attend the GMS-----
first and second;
 - 4) Efforts have been made in order to fulfill the quorum of the GMS-----
second; and -----
 - 5) The amount of the third GMS quorum proposed and the reason. -----
 - d. The third GMS is prohibited from being held by the Company before obtaining
determination from the OJK as referred to in letter a of this paragraph. -----
 10. The meeting agenda is regulated with the following provisions: -----
 - a. The Company is obliged to provide meeting agenda materials for shareholders,-
which can be accessed and downloaded through the Company's website and/or
e-GMS;
 - b. The agenda of the meeting as intended in letter a of this paragraph is mandatory
available from the date of the convening of the GMS until-----
the holding of the GMS;
 - c. In the event that the provisions of other laws and regulations regulate the
obligations of
availability of meeting agenda materials earlier than the provisions as -----
Referred to in letter (b) of this paragraph, the provision of meeting agenda
materials is
following the provisions of other laws and regulations;-----
 - d. at the time of the GMS, shareholders have the right to obtain information-----

meeting agenda and materials related to the meeting agenda as long as it is not -
contrary to the interests of the Company; -----

- e. In terms of meeting agenda regarding the appointment of members of the Board of Directors and/or
members of the Board of Commissioners, curriculum vitae of prospective
members of the Board of Directors and/or -----
members of the Board of Commissioners to be appointed must be available by
the latest
at the time of the GMS, as long as it is regulated in the provisions of the -----
legislation.

11. In the event that the GMS is a GMS that is only attended by the Shareholders -----
Independent, the Company is required to provide a statement form with sufficient----
to be signed by Independent Shareholders prior to exercise -----
The GMS, at least states that:

- a. The person concerned is truly an Independent Shareholder; and-----
b. If it is later proven that the statement is not true, which -----
may be subject to sanctions in accordance with the provisions of the-----
legislation.

12. Errors in the invitation of the GMS can be made with the following provisions:-----

- a. The Company is obliged to make an error in the invitation of the GMS if there
is a change in the
information in the invitation of the GMS that has been carried out as -----
referred to in paragraph 7 letter b of this Article; -----
b. In the event of a change in information as referred to in letter a of this
paragraph
contains changes in the date of the GMS and/or additional points-----
GMS event, the Company is obliged to re-convene the GMS with -----
the procedure for summoning as intended in paragraph 7 of this Article; -----
c. Provisions on the obligation to re-convene the GMS as -----
referred to in letter b this paragraph does not apply in the event of a change in

information

regarding the date of the GMS and/or the addition of the agenda-----

The GMS was not conducted due to the Company's fault and as long as the
OJK did not

order a recall.

13. Rights of shareholders in the GMS: -----

a. Shareholders either alone or represented based on a power of attorney have the
right to

attend the GMS;-----

b. Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders -----

whose name is recorded in the Company's register of shareholders 1 (one) day--
work before the invitation of the GMS;-----

c. In the event of the second GMS and the third GMS, the provisions of the -----

The shares that are entitled to be present are as follows: -----

1) For the second GMS, the shareholders who are entitled to attend are-----

shareholders registered in the Company's register of shareholders -----

1 (one) working day before the second GMS convening;-----

2) For the third GMS, the shareholders who are entitled to attend are -----

shareholders registered in the Company's register of shareholders -----

1 (one) working day before the invitation of the third GMS.-----

d. In the event of a re-summons as intended in Article 14 -----

paragraph 12 letter b, shareholders who are entitled to attend the GMS are-----

shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders -----

The Company 1 (one) working day before the re-convening of the GMS; -----

In the event of a recall error, it does not result in a re-recall -----

As referred to in paragraph 12 letter b of this Article, shareholders who -----

have the right to attend according to the provisions of the shareholders as
intended

in letter b of this verse. -----

14. Electronic authorization:

- a. The Company is obliged to provide an alternative to the electronic authorization of
shareholders to attend and vote at the GMS;-----
- b. Shareholders as referred to in paragraph 13 of this Article may-----
authorizing another party to represent him or her in attendance and/or -----
vote in the GMS in accordance with the provisions of laws and regulations-----
invitation;
- c. The granting of power of attorney as referred to in letter b of this paragraph can
be done
shareholders electronically through the e-GMS provided by -----
The provider of e-GMS or the system provided by the Company, in the event
that
The Company uses the system provided by the Company; -----
- d. The granting of power of attorney as intended in letter c of this paragraph shall
be carried out
no later than 1 (one) working day before the GMS; -----
- e. Shareholders can list voting options on each agenda item -----
in the granting of power of attorney electronically;-----
- f. Shareholders can make changes in power including voting-----
As referred to in letter c of this paragraph if the shareholder-----
list vote options;
- g. Change of power including the choice of vote as referred to in letter f-----
This paragraph can be done no later than 1 (one) working day before -----
the holding of the GMS;
- h. Parties who can be authorized electronically include: -----
 - 1) Participants who administer sub-accounts of securities/securities owned
by
shareholder;
 - 2) parties provided by the Company; or -----
 - 3) party appointed by shareholders. -----

- i. The Company is obliged to provide an electronic proxy as follows: -----
referred to in letter h number 2 of this paragraph;-----
- j. The recipient of the power of attorney as referred to in letter h of this paragraph must:
 - 1) competent according to law; and -----
 - 2) Not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners and
Employees of the Company. -----
- k. The recipient of the power of attorney as referred to in letter j of this paragraph must have
registered in the e-GMS system or the system provided by the Company, -----
in the event that the Company uses the system provided by the Company; -----
- l. In the event that the power of attorney attends the GMS in person, the authority of the
The authorized person to vote on behalf of the authorized person is declared ----
cancel; -----
- m. Appointment and revocation of power of attorney, as well as grant and change -
vote through the e-GMS or the system provided by the Company in the event that
The Company uses the system provided by the Company, considered valid-----
and is valid for all parties, and does not require a wet signature -----
unless otherwise stipulated in the provisions set by the e-GMS provider-----
and/or the provisions of laws and regulations;-----
- n. Mechanism for registration, appointment and revocation of power of attorney
and grant
and changes in votes are regulated by the e-GMS provider;-----
- o. In the event that the Company uses the system provided by the Company, -----
mechanism for registration, appointment and revocation of powers of attorney
and grant
and changes in votes are regulated in standard operating procedures -----

the holding of the Company's GMS; -----

- p. The authorized person is responsible for the power of attorney received from the holder

shares and must exercise such power in good faith and not-----

violating the provisions of laws and regulations.-----

15. Providers of e-GMS:-----

- a. Activities as an e-GMS provider can only be carried out by the -----

Storage and settlement designated by the OJK or other parties -----

approved by the OJK; -----

- b. Other parties approved by the OJK as referred to in letter a of this paragraph ----

must be connected with the Depository and Settlement Institution and the Bureau

securities administration to ensure that shareholders who are entitled to attend the

GMS; -----

- c. Other parties approved by the OJK as referred to in letter b of this paragraph----

must be in the form of an Indonesian legal entity and domiciled in the-----

Republic of Indonesia; -----

- d. Obligations of other parties approved by the OJK as referred to in letter b -----

This paragraph also applies to the Company, in the event that the Company uses the

provided by the Company;

- e. The e-GMS provider is required to at least: -----

- 1) Registered as an electronic system operator from an authorized agency ----

in accordance with the provisions of laws and regulations;-----

- 2) Providing access rights to e-GMS users to be able to access -----

e-GMS;-----

- 3) Have a mechanism or operation for the implementation of e-GMS; -----

- 4) Ensuring the implementation of activities and the sustainability of e-activities

- GMS; -----
- 5) Ensuring the security and reliability of the e-GMS; -----
 - 6) Inform e-GMS users in the event that there is -----
changes or system development including the addition of services and -----
e-GMS feature;-----
 - 7) Provides an audit track record of all processing activities -----
e-GMS data for the purposes of supervision, law enforcement,-----
dispute resolution, verification and testing; -----
 - 8) Own and place replacement facilities for data centers and centers -----
disaster recovery related to the implementation of e-GMS in Indonesia-----
in a secure location and separate from the main data center; -----
 - 9) Meet the minimum standards of security information technology systems -
information technology, system disruptions and failures, and management
transfer
information technology systems; -----
 - 10) Storing all data on the implementation of the e-GMS; and -----
 - 11) Responsible for losses incurred due to fault or -----
its negligence in the provision and management of the e-GMS. -----
- f. In the event that the Company conducts the GMS electronically by -----
using the system provided by the Company, the obligation of the e-provider-----
The GMS as referred to in letter e of this paragraph also applies to -----
The Company, except for the obligation to place facilities in place of data
centers and
disaster recovery centers in the territory of Indonesia as referred to in -----
letter e number 8 of this verse; -----
- g. The e-GMS provider establishes provisions regarding procedures and
procedures
the use of e-GMS;
- h. Provisions regarding procedures and procedures for the use of e-GMS as -----
The meaning of letter g of this paragraph is effective after obtaining approval---

OJK; -----

i. Provisions regarding procedures and procedures for the use of e-GMS as -----

The meaning of letter g of this paragraph includes at least:-----

1) Requirements and procedures for registration and/or granting access rights
to e-GMS Users, including cancellation of e-user registration -----

GMS; -----

2) Registration and/or use fees for e-GMS; -----

3) Procedures for using e-GMS; -----

4) Rights and obligations of e-GMS users; -----

5) Restrictions on access to the use of e-GMS; -----

6) Confidentiality, integrity and availability of information on the
implementation of the GMS

which is contained in the e-GMS; -----

7) Reporting and data collection mechanisms in the context of fulfillment ---
the Company's reporting obligations; -----

8) Protection of personal data in accordance with the provisions of laws and
regulations

invitation; and -----

9) Temporary suspension of service provision to e-users -----

GMS; -----

16. Publication Media and Languages Used: -----

a. Obligation to make announcements, summons, summons errors,-----

re-convening and announcement of the summary of the minutes of the GMS as-
referred to in the Company's articles of association, through at least:-----

1) The website of the e-GMS provider;-----

2) Stock exchange website; and-----

3) the Company's website;-----

In Indonesian and foreign languages, with the provision of foreign languages ---
who use the least English.

b. Announcements using foreign languages as referred to in -----

letter a point 3 must contain the same information as the information in the-----
announcements in Indonesian.

- c. In the event that there is a difference in the interpretation of the information
announced in the
foreign language as announced in Indonesian as -----
referred to in letter b, information in Indonesian used -----
as a reference. -----
- d. In the event that the Company uses the system provided by the Company, -----
provisions regarding the media of announcement, summons, re-summons and --
announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in
letter a
up to letter c this paragraph is done through at least: -----
- 1) Stock exchange website; and-----
 - 2) the Company's website;-----
- In Indonesian and foreign languages, with the provision of foreign languages ---
who use the least English.

----- **LEADERSHIP AND BROCHURE** -----

----- **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** -----

----- **Article 15** -----

1. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the
Board of Commissioners
Commissioner. In the event that all members of the Board of Commissioners are
absent or
obstruction, the GMS is chaired by one of the members of the Board of Directors
who
appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors are not-----
present or obstructed, the GMS is led by the Shareholders present -----
in the GMS appointed by and from the participants of the GMS. -----
2. In the case of members of the Board of Commissioners appointed by the Board of

Commissioners

has a conflict of interest in what will be decided in the -----
GMS, then the GMS is chaired by another member of the Board of Commissioners --
who have no conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners. -----
If all the Board of Commissioners have a conflict of interest, then the GMS-----
led by one of the Directors appointed by the Board of Directors, in the event that ----
one of the Directors appointed by the Board of Directors has a conflict -----
interests on matters decided at the GMS, the GMS is chaired by-----
members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest. When all --
members of the Board of Directors have a conflict of interest, so the GMS is led by --
one of the Shareholders is not a controller appointed by the majority -----
Other Shareholders who attended the GMS.-----

- 3.a . At the opening of the GMS, the Rules of Conduct of the GMS must be given to
the Holders
Stocks present.
- b. The points of conduct of the GMS must be read before the GMS begins.-----
- c. The Chairman of the Meeting at the opening of the GMS is obliged to give an
explanation
to the Shareholders at least regarding : -----
 - 1) Regarding the general condition of the Company briefly; -----
 - 2) Meeting Agenda;-----
 - 3) Decision-making mechanisms regarding the procedures of the Meeting;
and
 - 4) Procedures for exercising the right of Shareholders to ask questions -----
and/or opinions. -----
4. The Company is required to prepare the Minutes of the GMS and the Summary of
the Minutes of the GMS.
5. The minutes of the GMS must be made and signed by the Chairman of the Meeting
and at the most
at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the Participants of the GMS. -----

6. Signature as referred to in paragraph 5 is not required if the Leaflet-----
The GMS was made by the Notary in the form of a deed of Minutes of the GMS. ----
7. The minutes of the GMS must be submitted to the OJK no later than 30 days after
the GMS
Held. In case the time of delivery of the Tract falls on a holiday-----
The Company is obliged to submit the minutes no later than the next business day. ---
8. The Summary of the Minutes of the GMS must contain at least the following
information:
 - a. Date and date of GMS, place of GMS, time of implementation-----
GMS, and the agenda of the GMS;-----
 - b. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are
present at the GMS;
 - c. The number of shares with valid voting rights present at the GMS and -----
presentation of the total number of shares that have voting rights-----
legitimate; -----
 - d. Whether or not there is an opportunity for Shareholders to-----
ask questions and/or provide opinions related to the agenda -----
Meeting; -----
 - e. Number of Shareholders who ask questions and/or -----
provide opinions regarding the agenda, if the Shareholders are given -----
opportunity; -----
 - f. Decision-making mechanism;
 - g. Voting results which include the number of votes in favor or disapproval, -----
and *abstain* (not voting) for each meeting item, if -----
decision-making is carried out by voting; -----
 - h. Resolution of the GMS; and -----
 - i. Implementation of cash dividend payments to Shareholders who -----
entitled if there is a resolution of the GMS related to the distribution of
dividends
cash. -----

9. The Company is obliged to announce the Summary of the Minutes of the GMS to the public at the most-----
no later than 2 working days after the GMS is held at least through: -----
- the website of the e-GMS provider; -----
 - the website of the stock exchange; and -----
 - the Company's website, -----
- in Indonesian and foreign languages with the provision of foreign languages that -----
used at least English. -----
10. The Company is required to submit proof of announcement to the OJK no later than -
2 (two) working days after the announcement. Provisions in this Articles of
Association
related to the submission of the minutes of the GMS and the summary of the minutes
of the GMS
announced and announcement of the summary of the Minutes of the GMS to the
OJK mutatis
mutandis applies to the holding of the GMS by the Shareholders who -----
has obtained a Court Determination.
11. The Chairman of the Meeting has the right to request those present at the meeting to -
prove their right to attend the meeting in question. -----

----- **QUORUMS, VOTING RIGHTS AND DECISIONS** -----
----- **AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** -----

----- **Article 16** -----

1. Quorum of attendance and decision of the GMS on matters to be decided-----
in the GMS is carried out by following the following provisions: -----
- GMS can be held if the GMS is more than 1/2 (one-half) -----
part of the total number of shares with voting rights present or represented; ---
 - In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-
second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled -----
take a decision if in the GMS at least 1/3 (one-third)-----

- part of the total number of shares with voting rights present or represented; ---
- c. the resolution of the GMS as referred to in letters a and b is valid -----
 if approved by more than 1/2 (one-half) of the entire share -----
 with voting rights present at the GMS; -----
 - d. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in
 letter -----
 b is not achieved, the third GMS can be held with the provision of the third
 GMS-----
 and has the right to make a decision if it is attended by shareholders from ----
 Shares with valid voting rights in quorum of attendance and quorum -----
 decisions determined by the OJK upon the Company's application; -----
 - e. Provisions for the quorum of attendance and quorum of resolutions of the
 GMS as -----
 The letters a, b, c, and d also apply to quorums of attendance and -----
 quorum of GMS resolutions for material transaction agenda and/or -----
 changes in business activities, except for material transaction items-----
 in the form of the transfer of the Company's assets of more than 50% (fifty
 percent) -----
 total net worth. -----
2. Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS for the agenda of the
 transition -----
 the Company's assets or make the Company's debt collateral -----
 constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net worth -----
 in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or -----
 not done with the following provisions: -----
 1. The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who -----
 represent at least 3/4 (three-quarters) of the total -----
 shares with valid voting rights; -----
 2. the resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if -----
 approved by more than 3/4 (three-quarters) of the entire share -----

- with voting rights present at the GMS; -----
3. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-
second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled ----
make a decision if the GMS is attended by shareholders who -----
represents at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares -----
with valid voting rights; -----
 4. the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4
(three per-----
four) part of all shares with voting rights present at the GMS;-----
 5. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in
the
letter c is not achieved, the third GMS can be held with the provisions of the
GMS-----
Third, it is valid and has the right to make decisions if attended by holders ----
shares of shares with valid voting rights in a quorum of attendance and -----
quorum of decisions determined by the OJK upon the Company's application.
 3. Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only
attended by-----
Independent Shareholders as stipulated in the regulations in the field of Market-----
Capital is carried out with the following provisions: -----
 - a. GMS can be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half)-----
a share of the total number of shares with valid voting rights owned -----
Independent Shareholders; -----
 - b. the resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if -----
approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares -----
with valid voting rights owned by Independent Shareholders;-----
 - c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-
can be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half)-----
a share of the total number of shares with valid voting rights owned -----
Independent Shareholders; -----

- d. the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one-----two) part of the total number of shares with valid voting rights that ----- owned by Independent Shareholders present at the GMS;-----
 - e. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in the----- letter c is not achieved, the third GMS can be held with the provisions ----- The third GMS is valid and has the right to make a decision if it is attended by ----- Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in----- quorum of attendance determined by the OJK upon the Company's request;---
 - f. the resolution of the third GMS is valid if approved by the Shareholders----- Independent representing more than 50% (fifty percent) of the shares that ----- owned by Independent Shareholders present at the GMS.-----
4. GMS to conduct changes in the Board of Directors, changes in the Board of Commissioners, ----- issuance of Equity Securities and or Increase in issued capital and----- Paid up within the authorized capital limit is carried out with the following conditions: -----
 - a. GMS can be held if the GMS is more than 1/2 (one-half) ----- part of the total number of shares with voting rights present or represented; ---
 - b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS- second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled ----- take a decision if in the GMS at least 1/3 (one-third)----- part of the total number of shares with voting rights present or represented; ---
 - c. the resolution of the GMS as referred to in letters a and b is valid ----- if approved by more than 1/2 (one-half) of the entire share ----- with voting rights present at the GMS; -----
 - d. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter -----

- b is not achieved, the third GMS can be held with the provision of the third GMS-----
- and has the right to make a decision if it is attended by shareholders from ----
- Shares with valid voting rights in quorum of attendance and quorum -----
- decision determined by the OJK on the Company's application. -----
5. GMS to amend the Company's articles of association, carried out by -----
- the provisions are as follows: -----
- a. GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who -----
- represents at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares -----
- with valid voting rights; -----
- b. the resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if -----
- approved by more than 2/3 (two-thirds) of the entire share with -----
- voting rights present at the GMS; -----
- c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-
second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled ----
- take a decision if the GMS is attended by shareholders who -----
- represent at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares -----
- with valid voting rights; -----
- d. the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2
(one per -----
- two) part of all shares with voting rights present at the GMS; -----
- e. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in
letter -----
- c is not achieved, the third GMS can be held with the provisions of the third
GMS-----
- and has the right to make a decision if it is attended by shareholders from ----
- Shares with valid voting rights in quorum of attendance and quorum -----
- decision determined by the OJK on the Company's application. -----
6. By paying attention to the provisions of the applicable laws and regulations -----
- then merger, merger, takeover, separation, filing-----

application for the Company to be declared bankrupt, and dissolution can only -----
based on the resolution of the GMS, with the following provisions: -----

1. The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who -----

represent at least 3/4 (three-quarters) of the total-----

shares with valid voting rights; -----

2. The resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if-----

approved by more than 3/4 (three-quarters) of the entire share -----

with voting rights present at the GMS; -----

3. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-

second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled-----

make a decision if the GMS is attended by shareholders who-----

represents at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares -----

with valid voting rights;-----

d. the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4

(three per -----

four) part of all shares with voting rights present at the GMS;-----

e. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in

the-----

letter c is not achieved, the third GMS can be held with the provisions of the

GMS -----

Third, it is valid and has the right to make decisions if attended by holders ---

shares of shares with valid voting rights in a quorum of attendance and -----

quorum of decisions determined by the OJK upon the Company's

application. -----

7. In the event that the Company has more than 1 (one) stock classification, the GMS

shall-----

agenda of change of share rights is only attended by shareholders on -----

classification of shares affected by changes in share rights on-----

classification of certain shares, with the following provisions: -----

a. GMS can be held if in the GMS at least 3/4 (three per -----

- four) part of the total number of shares in the stock classification that -----
affected by the change in such rights to be present or represented;-----
- b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the GMS-
second, it can be held provided that the second GMS is valid and entitled ----
take a decision if in the GMS at least 2/3 (two-thirds) -----
share of the total number of shares in the classification of affected shares-----
the impact of the change in the right present or represented;-----
- c. the resolution of the GMS as referred to in letters a and b is valid if-----
approved by more than 3/4 (three-quarters) of the shares with the right-----
votes present at the GMS;-----
- d. in the event of a quorum of attendance at the second GMS as referred to in
the-----
letter b of this paragraph is not achieved, the third GMS may be held with the
provision that-----
The third GMS is valid and has the right to make a decision if it is attended
by -----
Shareholders on the Classification of Affected Shares on -----
Changes in such rights in quorums of attendance and quorums of decisions ---
determined by the OJK upon the Company's application; -----
- e. in the case of the classification of shares affected by the change of rights to ---
shares in a particular stock classification do not have voting rights, -----
shareholders on the classification of such shares under the Regulation-----
OJK is given the right to attend and make decisions at the GMS-----
related to changes in share rights in the stock classification. -----
- 8.a . Shareholders either alone or represented by power of attorney-----
have the right to attend the GMS, by paying attention to the laws and
regulations -----
applicable invitations;-----
1. Shareholders can vote in the GMS
electronic through the e-GMS, as specifically regulated in the regulations in

the-----
Capital Market field. -----

9. In the GMS, each share gives the right to its owner to issue 1 -----
(one) vote. -----
10. Shareholders of shares with valid voting rights present at the GMS -----
but not making a sound (abstaining) is considered to make a sound that-----
is the same as the majority of shareholders who voted. -----
11. In voting, the votes cast by the shareholders shall prevail-----
for all shares owned by him and shareholders are not entitled-----
power to more than one person for a portion of the amount -----
shares that he owns with different votes. Different sounds that -----
issued by the custodian bank or securities company representing the holder-----
Shares in mutual funds are not a different voice-----
as intended in this article. -----
12. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and
employees of the Company may -----
acting as a proxy in the GMS, but in the voting of members -----
The Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or their
employees are prohibited -----
act as a proxy of the shareholders. In the event that the power of attorney is given in
electronic devices, members of the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners, and/or employees of the Company -----
It is forbidden to act as a power of attorney. -----
13. Voting can be done orally and/or in writing. -----
14. All decisions are taken based on deliberation for consensus. -----
15. In the event of a decision based on deliberation for consensus as -----
The meaning in paragraph 14 is not achieved, then the decision is taken through a
vote-----
as specified in this Articles of Association. -----
16. During the implementation of the GMS, the Company may invite other related

parties-----
with the agenda of the GMS. -----

----- **BOARD OF DIRECTORS** -----

----- **Article 17** -----

1. The Company is managed and led by the Board of Directors whose number is adjusted to
the Company's needs with the provision of at least 2 (two) members of the Board of Directors,
one of them was appointed as President Director with regard to-----
provisions of applicable laws and regulations in the field of Capital Market.-----
2. The members of the Board of Directors shall be appointed for a period of time from the date of -----
determined by the GMS that appoints it and ends at the closing of the 5th (five) Annual GMS----- after the date of its appointment, provided that it may not----- exceed a period of 5 (five) years, taking into account the regulations in the field of -- -- Capital Market, but without prejudice to the right of the GMS to----- at any time dismiss the members of the Board of Directors before the expiration of their term----- After the term of office ends, the members of the Board of Directors may-- be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.-----
3. A member of the Board of Directors is an individual who meets the -----
Requirements at the time of appointment and during office: -----
 - a. Have good morals, morals and integrity; -----
 - b. Capable of performing legal acts;
 - c. In 5 (five) years prior to appointment and during office: -----
 - 1) Never declared bankrupt;
 - 2) Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners
who is found guilty of causing the company's condition to be declared -----
bankrupt; -----
 - 3) Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental-----

- state finance and/or related to the financial sector; and -----
- 4) Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Directors
- Commissioners who during their tenure: -----
- a) Never held an Annual GMS;-----
- b) Accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Directors -----
- The Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never been
- provide accountability as a member of the Board of Directors -----
- and/or members of the Board of Commissioners to the GMS;-----
- c) Ever caused a company that obtained a permit, approval-----
- or registration from the Financial Services Authority does not meet the
- Obligation to submit annual reports and/or reports -----
- finance to the Financial Services Authority;-----
- 5) Have a commitment to comply with laws and regulations; and-----
- 6) Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company. ---
4. Fulfillment of requirements, contained in the Statement Letter signed by -----
- candidates for members of the Board of Directors and the letter was submitted to the Company. Letter
- The statement is researched and documented by the Company.-----
5. In addition to fulfilling the requirements as intended in paragraph 4 of this Article,---
- The appointment of members of the Board of Directors is carried out by paying attention to their expertise,
- experience and other requirements based on applicable laws and regulations.-----
6. In addition to fulfilling the provisions as intended in paragraph 3, the Director -----
- Independents must meet the following requirements: -----
- a. Not having an affiliate relationship with the Company's Operator at least -----
- less than 6 (six) months prior to the appointment as Director -----

Independent;-----

- b. Not having an Affiliate relationship with the Board of Commissioners or members

Management;-----

- c. Not working concurrently as a Director of other companies; and-----

- d. Not being an insider in the Capital Market Support institution or profession -----
whose services are used by the Company for 6 (six) months prior to the-----
appointment as Independent Director. -----

-The term of office of the Independent Director is a maximum of 2 (two) consecutive periods.

- 7. Appointment of members of the Board of Directors, who do not have the following requirements:

referred to in paragraph 3 and paragraph 5 of this Article, null and void due to law from the time the member

Other directors or the Board of Commissioners know that the requirements are not met

aforementioned. -----

- 8. Between the members of the Board of Directors and between the members of the Board of Directors and the Members of the Board of Directors-----

Commissioners must not have blood relatives up to the 3rd degree -----

(third), either according to a straight line or a sideways line or a relationship -----

semenda (son-in-law or brother-in-law). In the event that the situation as intended occurs

in this paragraph, the GMS is authorized to dismiss one of the -----
they.

- 9. Members of the Board of Directors may concurrently hold positions as: -----

- 1) Members of the Board of Directors at most in 1 (one) other Company; -----

- 2) Members of the Board of Commissioners at most 3 (three) other companies; ----
and/or -----

- 3) The most committee members in 5 (five) committees in the Company where

the

also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Directors

Commissioner. -----

-Dual positions can only be done as long as they do not conflict with -----
other laws and regulations.

10. The Company held a GMS to replace members of the Board of Directors -----
who do not meet the requirements as intended in paragraph (3).-----

11. Proposal for appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors

to the GMS must pay attention to the recommendations of the Board of Commissioners or

committee that performs the nomination function. -----

12. Members of the Board of Directors may be given salaries and/or allowances in the amount of

determined by the GMS and the authority by the GMS can be delegated-----
to the Board of Commissioners. -----

13. If for some reason, the position of a member of the Board of Directors is vacant, then:

a. The vacancy must be filled in the next GMS that schedules -----
filling the vacancies;

b. As long as the position is vacant and his replacement has not existed or has not been held

position, then one of the other members of the Board of Directors appointed by the

The Board of Commissioners, carries out the work of the members of the Board of Directors referred to as

the same power and authority.

14. The term of office of a person appointed by the GMS to fill the vacancy-----
is for a period of 5 (five) years in the meaning as intended -----

- in paragraph 2 of this Article. -----
15. In the event that there is an increase in the number of members of the Board of Directors, the term of office shall be
- The new Board of Directors is for a period of 5 (five) years in -----
- meaning as intended in paragraph 2 of this Article. -----
16. If for any reason the Company does not have a member of the Board of Directors, then
- for the time being, the Board of Commissioners is obliged to carry out the work of---
- The Board of Directors is running, but only with the right to-----
- management acts related to matters related to current activities-----
- running, with obligations within a period of no later than 90 (ninety)-----
- day after the vacancy occurs, to hold a GMS to fill the-----
- vacancies.
- 17.a . Members of the Board of Directors may resign from their positions before the term of
- his term of office expires, with the obligation of the member of the Board of Directors concerned
- submit a resignation request to the Company. -----
- b. The Company is obliged to disclose information to the public and-----
- submit to the Financial Services Authority no later than 2 (two) days -----
- after the receipt of the resignation of the Board of Directors and the results of the
- holding the GMS.
- c. The Company convenes a GMS to decide on the application-----
- resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days
- After the receipt of the resignation application. -----
- d. To members of the Board of Directors who resign as such -----
- can be held accountable from the appointment of-----
- until the date of his resignation becomes effective. -----
- 18.Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of

Commissioners

by stating the reason, which is notified in writing to the member-----

The Board of Directors concerned.

-In the event that there is a member of the Board of Directors who is temporarily dismissed, the Board of Directors

Commissioners must convene a GMS to revoke or strengthen-----

The decision of the temporary dismissal.-----

19. The GMS as intended in paragraph 18 must be held within the -----
no later than 90 (ninety) days after the date of termination -----
while:

- a. With the expiration of the period of holding the GMS or the GMS is not -----
can make a decision, the temporary suspension becomes invalid. -----
b. In the GMS, the members of the Board of Directors concerned are given the
opportunity to
defend themselves.-----

20. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not
authorized to run
management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the
purpose and
the Company's objectives and represent the Company in and out of court. -----

21. Limitation of authority shall take effect from the decision of temporary dismissal by-
The Board of Commissioners until there is a resolution of the GMS that strengthens
or
canceling the temporary suspension or the past of the period. -----

22. The Company is obliged to provide information disclosure to the public and -----
to the Financial Services Authority regarding the decision of-----
temporary suspension and results of the GMS or information -----
regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of
Commissioners because it did not
the holding of the GMS until the expiration of the term, no later than 2-----

- (two) working days after the occurrence of the event.-----
23. The term of office of a member of the Board of Directors ends when:-----
- a. Term of office ends; -----
 - b. Passed away;
 - c. Effective resignation in accordance with the provisions of paragraph (17);-----
 - d. Dismissed based on the resolution of the GMS;-----
24. For members of the Board of Directors who retire before or after their term of office ends, unless it ceases due to death, then the person concerned is obliged to ----- conveying accountability for its actions to the GMS.-----

----- **DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND** -----

----- **AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS** -----

----- **ARTICLE 18** -----

1. The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company
for the benefit of the Company in accordance with the Company's aims and objectives in
Articles of Association, and represent the Company both inside and outside -----
court in accordance with the restrictions as set forth -----
in laws and regulations, Articles of Association and resolutions of the GMS. -----
2. In carrying out the duties as intended in paragraph (1), then:-----
 - a. The Board of Directors has the rights and authorities, including: -----
 - 1) Establishing policies that are seen as appropriate in management-----
Company;-----
 - 2) Arrange for the transfer of power of the Board of Directors to represent
the Company in -----
in and out of the Court to a person or persons who -----
appointed for that including the Company's employees either individually
or jointly and/or other entities;-----
 - 3) Regulating provisions on the Company's employees, including the
determination of -----

- wages, pensions or old-age security and other income for workers -----
- The Company is based on the prevailing laws and regulations; -----
- 4) Appointing and dismissing the Company's employees based on -----
the Company's labor regulations and laws and regulations; -----
 - 5) Appoint or dismiss the Corporate Secretary or Head-----
Internal Guard Unit with the approval of the Board of Commissioners;----
 - 6) Deleting bad receivables with the provisions as regulated-----
in this Articles of Association and hereafter reported to the-----
Board of Commissioners and reported and accountable in -----
Annual Report;-----
 - 7) No more collecting receivables, interest, fines, fees and other receivables
in -----
outside the principal carried out in the context of restructuring and/or -----
settlement of receivables and other acts in the-----
settlement of the Company's receivables with the obligation to report to --
The Board of Commissioners whose reporting provisions and procedures
are determined -----
by the Board of Commissioners; -----
 - 8) Performing all other actions and deeds regarding the management of-----
or ownership of the Company's assets, binding the Company with -----
other parties and/or other parties with the Company, and represent-----
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala --
kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan-----
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS. -----
- b. The Board of Directors is obliged to: -----
- 1) Strive and ensure the implementation of business and activities-----
The Company is in accordance with its aims and objectives and business
activities;-----
 - 2) Prepare in time the Company's Long-Term Plan, -----
The Company's Annual Work Plan and Budget, and work plan -----

- and changes to be submitted to the Board of Commissioners -----
- and obtain the approval of the Board of Commissioners;-----
- 3) Preparation of Shareholder Register, Special List, Minutes of GMS, and--
Minutes of the Board of Directors Meeting;-----
 - 4) Prepare an Annual Report which among other things contains financial
statements,-----
as a form of accountability for the Company's management, and -----
the Company's financial documents as referred to in the -----
laws on Company Documents; -----
 - 5) Prepare financial statements in letter b.4 above based on the Standards----
Financial Accounting and submit to the Public Accountant for-----
Audited;-----
 - 6) Submit the Annual Report after review by the Board of Commissioners---
within a period of no later than 4 (four) months after the financial year----
The Company ends up with the GMS to be approved and ratified; -----
 - 7) Providing an explanation to the GMS, regarding the Annual Report;-----
 - 8) Submit Balance Sheet and Profit and Loss Statement that has been
endorsed by-----
GMS in accordance with the provisions of the regulations; -----
 - 9) Prepare other reports required by the provisions of the law -----
invitation-----
 - 10) Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the
GMS, -----
Minutes of the Board of Commissioners Meeting, Minutes of the Board
of Directors Meeting and Reports -----
Annual and the Company's financial documents as referred to in letter ----
b.4 and b.5, and other documents of the Company;-----
 - 11) Depositing at the Company's place of residence: Register of
Shareholders,-----
Special List, Minutes of GMS, Minutes of the Board of Commissioners

- Meeting, Minutes -----
- Board of Directors Meeting, Annual Report, and the Company's financial documents and -----
- other documents of the Company; -----
- 12) Holding and maintaining the Company's administrative books in accordance with -----
- with the prevailing norms for a company; -----
- 13) Preparing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards -----
- and based on the principle of internal control, especially the -----
- management, record-keeping, storage, and supervision; -----
- 14) Providing periodic reports in a manner and time in accordance with -----
- applicable provisions, as well as other reports whenever requested by -----
- The Board of Commissioners by paying attention to the laws and regulations -----
- especially regulations in the field of Capital Market; -----
- 15) Prepare the Company's organizational structure complete with details -----
- his duties; -----
- 16) Plan, manage, and control activities and functions -----
- which are strategic, including cash management, -----
- logistics, procurement, *capital expenditure* and others; -----
- 17) Planning and developing strategic and operational policies that -----
- has not been stipulated in the Company's Long-Term Plan as -----
- referred to in letter b.2 above; -----
- 18) Drafting the Charter of the Board of Directors; -----
- 19) Establishing guidelines and/or governance policies for management activities -----
- after first obtaining the approval of the Board of Directors -----
- Commissioner; -----
- 20) Provide an explanation of everything that is asked or asked -----

- by the Board of Commissioners by taking into account the laws and regulations -----
- invitations, especially in the field of Capital Market; -----
- 21) Carrying out other obligations in accordance with the provisions of the --- regulated in this Articles of Association stipulated by the GMS. -----
3. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out duties and responsibilities by good faith, full of responsibility, and prudence by heeding ----- applicable laws and regulations.
- 4.a . In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities
- The Board of Directors can form a committee.-----
-
- b. In the event of the formation of a committee, the Board of Directors evaluates the performance of
- committee at the end of each financial year.-----
-
5. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if -----
- The person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the benefit and
- the Company's business.-----
6. Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the - the meeting of the Board of Directors is the personal responsibility of the person concerned up to
- the action in question is approved by the Board of Directors meeting. -----
7. Each member of the Board of Directors is responsible for any losses -----
- The Company is caused by the mistake or negligence of the members of the Board of Directors in
- carrying out their duties.-----
8. Members of the Board of Directors cannot be held fully accountable personally -----

- or as referred to in paragraph (5) for the Company's losses if:-----
- a. can prove that the loss was not due to fault or -----
his negligence; -----
 - b. has carried out management in good faith and prudence to-----
interests and in accordance with the Company's aims and objectives; -----
 - c. does not have a conflict of interest either directly or indirectly -----
directly on management actions that result in losses;-----
 - d. has taken measures to prevent or continue to lose-----
aforementioned.-----
9. Each member of the Board of Directors is prohibited from taking personal benefits
either in a
directly or indirectly from the Company's activities other than the income that-----
legitimate. -----
- 10 a. The following acts of the Board of Directors must be approved in writing ----
from the Board of Commissioners to: -----
- a. release/transfer and/or collateralize the Company's assets -----
with a value exceeding a certain amount determined by the Board -----
Commissioners, except for assets recorded as inventory, with-----
paying attention to laws and regulations in the field of Capital Market;---
 - b. to cooperate with business entities or other parties, in-----
forms of Operational Cooperation (KSO), business cooperation (KSU),
cooperation -----
license, Build, *Operate and Transfer* (BOT), Build -----
Handover (*Build, Transfer and Operate*/BTO), Build Guna Milik-----
(*Build, Operate and Own*/BOO) and other agreements that have-----
the same nature whose duration or value exceeds-----
determined by the Board of Commissioners; -----
 - c. establish and change the Company's logo/brand; -----
 - d. Establish an organizational structure of 1 (one) level below the Board of
Directors; -----

- e. making capital participation, releasing capital participation including-----
changes in capital structure with a certain value set -----
Board of Commissioners in other companies, subsidiaries, and
companies -----
joint ventures that are not in the context of rescuing receivables with -----
paying attention to laws and regulations in the field of Capital Market;---
- f. establishing subsidiaries and/or joint ventures with a value of-----
determined by the Board of Commissioners with regard to -----
provisions in the field of Capital Market; -----
- g. propose the Company's representative to become a candidate for a
member of the Board of Directors and -----
Board of Commissioners on subsidiaries that contribute -----
significant to the Company and/or the strategic value determined -----
by the Board of Commissioners; -----
- h. carry out mergers, mergers, acquisitions, separations, and-----
Dissolution of subsidiaries and joint ventures with -value-----
determined by the Board of Commissioners with regard to -----
laws and regulations in the field of Capital Market; -----
- i. bind the Company as a guarantor (*borg* or *avalist*) with a value of-----
determined by the Board of Commissioners with regard to -----
laws and regulations in the field of Capital Market; -----
- j. receive medium/long-term loans and provide-----
medium/long-term loans with a certain set value -----
The Board of Commissioners by paying attention to the laws and
regulations -----
invitations in the field of Capital Market; -----
- k. providing short/medium/long-term loans that are not -----
operational, unless the loan to the subsidiary is sufficient -----
reported to the Board of Commissioners; -----
- l. Eliminate from the books of bad receivables and inventories -----

- dead goods with a value determined by the Board of Commissioners; -----
- m. perform actions included in material transactions-----
as stipulated by the laws and regulations in the field of-----
Capital Market with a certain value determined by the Board of
Commissioners,-----
unless such action is included in a material transaction that-----
exempted by laws and regulations in the field of Capital Market;-----
- n. actions that have not been determined in the Work Plan and Budget -----
Company.-----
- o. Carrying out the main business activities as intended in Article 3 which --
using financing by the Company with a certain value that-----
determined by the Board of Commissioners by taking into account the
regulations -----
legislation in the field of Capital Market. -----
- p. Purchase land assets and/or land banks for activities -----
property business or used as a fixed asset, with a value of -----
determined by the Board of Commissioners with regard to -----
laws and regulations in the field of Capital Market;-----
- q. Establishing foundations, organizations and/or associations with -----
laws both directly and indirectly related to -----
formed by the Company with a certain value determined by the Board of-
Commissioners by paying attention to the laws and regulations that -----
pretend.-----
- 10 b. Determination of limitations and/or criteria by the Board of Commissioners
for matters -----
As referred to are letters (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p)-----
and (q) this paragraph shall be carried out by the Board of Commissioners
after obtaining-----
the consent of the majority shareholders. -----
- 10 c. The approval of the Board of Commissioners specifically with respect to

- letters (a), (b), (e), -----
 (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p), and (q) of this paragraph with limitations
 and/or-----
 certain criteria after obtaining the approval of the majority shareholders.-----
- 10 d. The actions of the Board of Directors as referred to in letters (b), (e), (f), (g),
 and (h) of this paragraph as long as necessary in order to participate in
 tenders and/or to carry out projects and/or meet the requirements and/or
 implementation of main business activities that are commonly carried out in
 the business field concerned by paying attention to the provisions of laws and
 regulations, do not require the approval of the Board of Commissioners
 and/or the GMS.
11. If within 45 (forty-five) calendar days from the receipt of the-----
 requests or explanations and documents from the Board of Directors, the Board of
 Commissioners shall not-----
 giving a decision as intended in paragraph 10 of this Article, then -----
 The Board of Commissioners is considered to approve the proposal of the Board of
 Directors.-----
12. The following acts can only be carried out by the Board of Directors after -----
 obtain approval from the GMS to:-----
- a. Performing actions included in material transactions-----
 as stipulated by the laws and regulations in the field of-----
 capital market with a value above 50% (fifty percent) of equity;-----
- b. Not collecting any more bad debts that have been written off.-----
13. The Board of Directors is obliged to seek the approval of the GMS to: -----
- a. transfer of the Company's assets; or -----
- b. to make the Company's debt collateral for assets; -----
 which is more than 50% (fifty percent) of the total net worth-----
 The Company in 1 (one) or more transactions, whether related at the same time ----
 1 (one) book year; -----
- 14.a . Transaction as intended in paragraph 13 letter a is a transaction-----

- transfer of the Company's net assets incurred within the period of-----
1 (one) book year; -----
- b. While the transaction as referred to in paragraph 13 letter b is-----
the Company's wealth guarantee transaction for a period of 1 (one) year -----
books or more. -----
15. Legal acts as intended in paragraph 13 of this Article without consent -----
The GMS remains binding on the Company as long as the other parties are
involved in legal acts -----
in good faith. -----
16. Legal acts to transfer/waive rights or make -----
debt guarantee for the Company's assets as referred to in the -----
paragraph 13 of this Article must be approved by the GMS attended or-----
represented by Shareholders who own at least 3/4 (three-quarters)-----
a portion of the total number of shares with valid voting rights and approved by ----
at least 3/4 (three-quarters) of the total number of votes. In the event that -----
the quorum of attendance is not reached, a second GMS can be held with-----
the presence of at least 2/3 (two-thirds) of the total number of votes.-----
17. Legal acts to transfer/waive rights or make security -----
debts of all or part of the assets that feed the merchandise or -----
inventory, including those derived from the repayment of bad debts that occur due
to -----
the implementation of the main business activities, does not require the approval of
the Board of-----
Commissioners or GMS.-----
18. To carry out legal acts in the form of transactions involving collisions-----
interests between the personal economic interests of members of the Board of
Directors, the Board of Directors -----
Commissioners or Shareholders with the economic interests of the Company, the
Board of Directors -----
requires approval of the General Meeting of Shareholders based on votes -----

agree the majority of the Shareholders who have no conflict-----
Interests.-----

19. The GMS may reduce the restrictions on the Board of Directors as stipulated in the-
Articles of Association or stipulate other restrictions on the Board of Directors
other than those -----
regulated in this Articles of Association, by heeding the provisions of the law-----
applicable invitations. -----
20. In order to carry out the management of the Company, the President Director shall
have the right to -----
for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company with all
provisions -----
the actions of the President Director have been approved by the Board of Directors'
meeting. -----
21. If the President Director is absent or obstructed for any reason, which -----
does not need to be proven to a third party, then one of the members of the Board
of Directors -----
appointed in writing by the President Director is authorized to act for-----
and on behalf of the Board of Directors and carrying out the duties of the President
Director.-----
22. In the event that the President Director does not make an appointment, then the
members of the Board of Directors-----
the longest in the position of authorized to act for and on behalf of the Board of
Directors and -----
carry out the duties of the President Director. -----
23. In the event that there is more than 1 (one) member of the Board of Directors who
has been in the-----
position, then the oldest member of the Board of Directors in the authorized age-----
act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the
Director-----
Main.-----

24. In the event that one of the members of the Board of Directors other than the President Director is unable to do so due to-----
Because of any kind, which does not need to be proven to a third party, then the----
other members of the Board of Directors appoint one member of the Board of Directors to -----
carry out the duties of the members of the Board of Directors who are obstructed.---
25. All actions of members of the Board of Directors representing the President Director are mandatory-----
approved at the Board of Directors Meeting. -----
26. The Board of Directors for acts that are relied upon by their own responsibilities, shall also have the right -----
appoint one or more persons as their representatives or proxies, by giving -----
to them or to them the power for certain acts which -----
regulated in the power of attorney. -----
27. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS. -----
In the event that the GMS does not stipulate the division of duties and authority between-----
The Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors.-----
28. The Board of Directors in managing the Company implements the instructions given by the-----
GMS as long as it does not conflict with laws and regulations-----
and/or this Articles of Association.-----
29. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if: -
a. There is a case in court between the Company and members of the Board of Directors -----
the person concerned; and-----
b. The members of the Board of Directors concerned have the interests of-----
clashes with the interests of the Company. -----

30. In the event that there are circumstances as referred to in paragraph (29), the right to representing the Company are: -----
- a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest -----
with the Company; -----
 - b. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a clash-----
interests with the Company; or -----
 - c. Other parties appointed by the GMS in the case of all members of the Board of Directors or-----
The Board of Commissioners has a conflict of interest with the Company. ----

----- **BOARD OF DIRECTORS MEETING** -----

----- **Article 19** -----

1. The Board of Directors is required to hold periodic meetings of the Board of Directors at least 1 (one) times in each month or at any time as deemed necessary by the Director-----
Principal or by one or more other members of the Board of Directors or upon request from the Board of Commissioners or upon written request of 1 (one) Shareholder or -
The more together represent 1/10 (one-tenth) part of the sum -----
all shares with valid voting rights.
 - a. It can be held if it is attended by a majority of all members of the Board of Directors;
 - b. The Board of Directors is obliged to hold a meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners in a-----
periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. -----
2. The call to the Board of Directors Meeting is made by the President Director or one of the members
Management. -----
3. The invitation to the Board of Directors Meeting shall be submitted to each member of the Board of Directors and shall be

carried out in writing by handing it over directly to each member -----
The Board of Directors with an adequate receipt, or by registered letter or-----
by courier service or by telex or telefax (in the case of telex or -----
telefax must be reaffirmed by a written letter submitted in-----
directly or by registered mail as soon as possible) no later than 5 (five) days -----
before the Meeting is held, without taking into account the date of the call and -----
Date of the Meeting. -----

4. The meeting call must include the event, date, time and place of the meeting. -----

5. The Board of Directors Meeting is held at the Company's place of residence or place
of activity

the Company's business. If all members of the Board of Directors are present or
represented, the summons

is not required and a Board of Directors Meeting can be held -----
anywhere and has the right to make valid and binding decisions. -----

6. The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director; in the
event that the President Director does not -----

can be present or obstructed which does not need to be proven to the party -----

Third, the Board of Directors Meeting will be chaired by one of the Directors elected
by the

members of the Board of Directors who are present and/or represented in the Board
of Directors Meeting.

7. The attendance of members of the Board of Directors at meetings is disclosed in the
annual report

The Company, with the obligation to schedule meetings for the following year
before

the end of the financial year. -----

a. At the scheduled meeting, meeting materials are submitted to the participants----
no later than 5 (five) days before the meeting is held.-----

b. In the event that there is a meeting held outside the schedule that has been -----
is prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants no

later than
meeting was held.

8. A member of the Board of Directors may be represented at the Board of Directors Meeting only by members
Other directors based on power of attorney.-----
9. The Board of Directors Meeting is valid and has the right to make binding decisions -
if more than 1/2 (one-half) of the number of members of the Board of Directors-----
are currently present or represented in the Meeting.-----
10. The decision of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation
for consensus.
In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, -----
So the decision is taken with the most votes.-----
11. If the votes in favor and disagreement are balanced, then the proposal is considered --
rejected.-----
- 12.a . Each member of the Board of Directors who is present has the right to issue 1
(one) vote and
an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors
represented by him/her;
b. Voting on people is carried out by closed ballot-----
without a signature, while voting on other matters -----
is carried out orally unless the Chairman of the Meeting determines otherwise
without any
objections based on the majority of votes from those present; -----
c. Blank votes and invalid votes are considered not to be issued in -----
valid and considered non-existent and not counted in determining the number of
the sound produced.
13. From all matters discussed and decided in the Board of Directors Meeting, Minutes
are made
Meeting. -----
14. The minutes of the Board of Directors Meeting shall be made by the Chairman of the

Meeting and then

must be signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors who

present in the meeting.-----

15. The minutes of the meeting shall be valid evidence against all members of the Board of Directors

and third parties about decisions and everything that happens in the Meeting.-----

16. If the minutes of the meeting are made by a Notary, the signing shall not be ----- Required.

17. The Board of Directors may also make a valid decision without holding a Board of Directors Meeting,

provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and

all members of the Board of Directors who are currently in office give their approval regarding

proposal submitted in writing and signing the decision. -----

18. Decisions taken in this way have the same force-----
with decisions lawfully taken in the Board of Directors Meeting.-----

19. The results of the meeting are stated in the minutes of the meeting, signed by all members

The Board of Directors was present, and was presented to all members of the Board of Directors.

20. In the event that there are members of the Board of Directors who -----
not meeting, the person concerned must state the reason in writing in the -----
separate letter affixed to the minutes of the meeting documented by -----
Company.-----

----- **BOARD OF COMMISSIONERS** -----

----- **Article 20** -----

1. The Board of Commissioners shall consist of at least 2 (two) members of the Board-
Commissioner.-----

- a. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board
Commissioners, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner. -----
 - b. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members
Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30%
(thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
 - c.1 (one) among the members of the Board of Commissioners shall be appointed as President Commissioner
or President Commissioner. -----
2. The Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners
cannot act alone, but based on the decision of the -----
Commissioner. -----
 3. Provisions regarding the requirements and fulfillment of requirements to become a member
The Board of Directors as referred to in Article 17 paragraph (3) mutatis mutandis applies
for members of the Board of Commissioners. -----
 4. In addition to fulfilling the provisions as intended in paragraph (3), the Commissioner
Independents must meet the following requirements: -----
 - a. Not being a person who works or has authority and -----
responsibility to plan, lead, control, or -----
supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except-----
for re-appointment as Independent Commissioner of the Company on-----
the next period;
 - b. Not owning shares either directly or indirectly in -----
The company;

- c. Not having an Affiliate relationship with the Company, members of the Board of Directors
Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company; and
 - d. Not having a direct or indirect business relationship -----
related to the Company's business activities. -----
5. In addition to meeting the criteria as intended in paragraphs 3 and 4 of this Article,---
The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by considering
integrity, dedication, understanding of company management issues -----
related to one of the management functions, having knowledge that -----
in the Company's business field and can provide sufficient time -----
to carry out their duties and other requirements under the regulations-----
legislation.
6. The Company is obliged to hold a GMS to replace members -----
The Board of Commissioners during their term of office no longer meet the requirements.
7. Provisions regarding the appointment, dismissal, and term of office of the Board of Directors
mutatis mutandis applies to members of the Board of Commissioners. -----
8. Members of the Board of Commissioners may concurrently hold positions as:-----
- a. Members of the Board of Directors at most 2 (two) other companies; and-----

 - b. Members of the Board of Commissioners at most in 2 (two) other companies. ---
9. In the event that a member of the Board of Commissioners does not concurrently hold a position as a member
The Board of Directors, members of the Board of Commissioners concerned can concurrently hold positions
as a member of the Board of Commissioners at most 4 (four) other companies.-----
- a. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as members

of the most

in 5 (five) committees in the Company where the person concerned is also -----
serving as a member of the Board of Directors or a member of the Board of
Commissioners.

b. Concurrent positions as committee members can only be done as long as they
do not
contrary to other laws and regulations. -----

c. In the event that there are other laws and regulations that regulate -----
provisions regarding concurrent positions are different from the provisions in
the
Articles of Association, the applicable provisions are the provisions that-----
regulate more strictly. -----

10. Independent Commissioner who has served for 2 (two) term of office -----
can be reappointed in a later period as long as the Independent Commissioner -----
stated that he remained independent to the GMS. -----

a. The Independent Commissioner's statement of independence must be disclosed
in the
Annual Report.

b. In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee,
the Commissioner

The Independent concerned can only be reappointed to the Committee-----
Audit for 1 (one) period of the next term of office of the Audit Committee.-----

c. In the event that there are other laws and regulations that regulate-----
provisions regarding the term of office are different from the provisions in the---
This Articles of Association, then what applies is the one that regulates more
strictly.

1. The members of the Board of Commissioners are appointed for a period of time
from the date of
determined by the GMS that appoints it and ends at the close of the 5th (fifth) Annual
GMS after the date of its appointment, provided that it does not----- may exceed a

period of 5 (five) years, taking into account the regulations in the ----- of the Capital Market, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time before the end of their term-----

2. After his term of office ends, the members of the Board of Commissioners can be appointed-----

by the GMS for 1 (one) term of office.-----

13. Any member of the Board of Commissioners is prohibited from taking personal advantage either

directly or indirectly from the Company's activities other than income ----- which is legitimate.-----

14. Members of the Board of Commissioners may be given honorarium and/or allowances that

the number is determined by the GMS. -----

15. If for some reason, the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, then:

- a. The vacancy must be filled in the next GMS that schedules----- filling the vacancies;

- b. As long as the position is vacant and his replacement has not existed or has not been held

position, then one of the other members of the Board of Commissioners who ---- appointed by the Board of Commissioners Meeting, carrying out the work of the members of the Board

Commissioner is meant with the same power and authority.-----

16. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his or her position

by notifying in writing of the intention to the Company----- at least 30 (thirty) days before the date of his resignation.-----

17. The Company is obliged to announce the Information Disclosure 2 (two) days after -- receipt of the letter of resignation of the Board of Commissioners Members.-----

18. The Company is obliged to hold a GMS within a period of 90 ----- at the latest (ninety) days after the receipt of the resignation letter. -----
19. In the event that the Company does not hold a GMS within the -----
As referred to in this verse, with the passage of time, -----
against the members of the Board of Commissioners who resigned to become -----
without requiring the approval of the GMS. -----
20. Members of the Board of Commissioners who resign are only exempted from -----
responsibility, if the GMS exempts him from his responsibilities during the -----
his tenure.
21. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, resulting in -----
the number of members of the Board of Commissioners becomes less than 2 (two)
people, then the
members of the Board of Commissioners who resign are valid if they have -----
determined by the GMS and new members of the Board of Commissioners have
been appointed
so as to meet the minimum requirements for the number of members of the Board of
Commissioners.
22. A person appointed to replace a member of the Board of Commissioners who -----
dismissed based on paragraph 3 above to fill vacancies due to -----
or an additional member of the Board of Commissioners -----
existing ones must be appointed for a period of time that is the remaining term of
office
other members of the Board of Commissioners who are still in office. -----
23. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends when: -----
a. Resign in accordance with the provisions of paragraph 16; -----
b. No longer meeting the requirements of the applicable laws; -----
c. Passed away;
d. Dismissed based on the Resolution of the GMS. -----
24. Proposal for appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of
Directors to

GMS as referred to in Article 17 paragraph 3, paragraph 11, paragraph 17 letter b, paragraph

18 and paragraph 19 mutatis mutandis apply to members of the Board of Commissioners.

25. Provisions regarding the resignation of members of the Board of Directors as intended

in Article 17 paragraph 17 mutatis mutandis applies to members of the Board of Commissioners.

----- **DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND** -----

----- **AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS** ----

----- **Article 21** -----

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, ----
the course of management in general both regarding the Company and the business-
The Company is carried out by the Board of Directors and provides advice to the
Board of Directors -----
including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, ----
The Company's Work Plan and Budget as well as the provisions of the Articles of
Association and -----
Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as laws and
regulations -----
in accordance with the Company's purpose and purpose-----
Company. -----
2. In carrying out the duties as intended in paragraph (1), then:-----
 - a. The Board of Commissioners is authorized to:-----
 - 1) examine books, letters, and other documents,-----
checking cash for verification purposes and other securities-----
and check the Company's assets;-----
 - 2) entering yards, buildings, and offices used by -----
Company; -----
 - 3) request an explanation from the Board of Directors and/or other

- officials regarding-----
- all issues related to the management of the Company; -----
- 4) know all policies and actions that have been and will be-----
run by the Board of Directors;-----
 - 5) request the Board of Directors and/or other officials under the Board of
Directors with-----
with the knowledge of the Board of Directors to attend the meeting of
the Board of Commissioners;-----
 - 6) appoint and dismiss a Council Secretary-----
Commissioner; -----
 - 7) temporarily dismissing members of the Board of Directors in
accordance with the provisions of the-----
these articles of association; -----
 - 8) establish the Audit Committee, the Remuneration and Nomination
Committee, the -----
Risk Monitor and other committees, if deemed necessary by-----
pay attention to the company's capabilities; -----
 - 9) using experts for specific things and within a period of time -----
at the Company's expense, if deemed necessary. -----
 - 10) carry out the Company's management actions under certain
circumstances-----
for a certain period of time in accordance with the provisions of the
Articles of Association -----
Ini.-----
 - 11) approving the appointment and dismissal of the Corporate Secretary ----
and/or Head of the Internal Supervisory Unit. -----
 - 12) attend the Board of Directors meeting and provide views-----
to the things discussed; -----
 - 13) carry out other supervisory authority as long as it is not -----
contrary to laws and regulations, articles of association, -----

- and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders. -----
- b. The Board of Commissioners is obliged to: -----
- 1) provide advice to the Board of Directors in carrying out management---
Company; -----
 - 2) give opinions and approval of the Work Plan and Budget -----
The Company's Annual Meeting and other work plans prepared by the
Board of Directors,-----
in accordance with the provisions of this Articles of Association; -----
 - 3) following the development of the Company's activities, providing
opinions-----
and advice to the General Meeting of Shareholders regarding any -----
problems that are considered important to the Company's management;
 - 4) report to the Majority Shareholders if symptoms occur -----
declining performance of the Company;-----
 - 5) propose to the General Meeting of Shareholders the appointment of-----
Public Accountant who will conduct an audit of the books -----
Company. -----
 - 6) Examine and review the periodic reports and annual reports that-----
prepared by the Board of Directors and signed the annual report. -----
 - 7) provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting-
Shareholders on Annual Reports, when requested;-----
 - 8) make minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep
copies thereof; -----
 - 9) report to the Company regarding its share ownership-----
and/or their families in the Company and other Companies; -----
 - 10) provide reports on the supervisory tasks that have been carried out -----
during the recent financial year to the General Meeting of Shareholders
Stock. -----
 - 11) provides an explanation of everything that is asked or that -----
requested by the majority shareholders by paying attention to the

- regulations-----
- legislation, especially those applicable in the field of Capital Market. ---
- 12) carry out other obligations in the context of supervision duties and -----
- Giving advice, as long as it does not conflict with the rules -----
- legislation, articles of association, and/or resolutions of the Meeting ---
- General Shareholders. -----
- 13) Submit quarterly reports on the Company's performance -----
- including the realization of Key Performance Indicators to
- Shareholders -----
- Mayoritas; -----
- 14) Drafting the charter of the Board of Commissioners; -----
3. In carrying out their duties, each member of the Board of Commissioners shall: ----
- a. Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as
- the-----
- principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, -----
- accountability, accountability, and fairness;-----
- b. Good faith, prudence and responsibility in-----
- carry out the duties of supervision and advice to the Board of Directors to-----
- interests of the Company and in accordance with the Company's aims and
- objectives. -----
4. Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an annual
- GMS -----
- and other GMS in accordance with their authority as stipulated in the-----
- Laws and Regulations and Articles of Association.-----
- 5.a . Each member of the Board of Commissioners is responsible for -----
- for the Company's losses caused by the fault or-----
- negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their
- duties. -----
- b. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for-----
- The Company as referred to in letter a, if it can prove: -----

- 1) the loss is not due to his fault or negligence;-----
- 2) has carried out supervision in good faith, with full responsibility-----
answer, and caution for the sake of the interests and in accordance with
the intention-----
and the objectives of the Issuer or Public Company;-----
- 3) does not have a conflict of interest, either directly or indirectly-----
directly for supervisory actions that result in losses; and-----
has taken action to prevent the occurrence or continuation of-----
losses. -----

----- **BOARD OF COMMISSIONERS MEETING** -----

----- **Article 22** -----

1. The Board of Commissioners is required to hold at least 1 (one) meeting in 2 (two) --
month, which can be held if attended by a majority of all members -----
Board of Commissioners. -----
2. The Board of Commissioners is required to hold meetings with the Board of
Directors on a regular basis, at least
less than 1 (one) time in 4 (four) months. -----
3. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting is disclosed
in the report
the Company's annual meeting. -----
4. The call to the Board of Commissioners Meeting is made by the President
Commissioner or one of the
a member of the Board of Commissioners. -----
- 5.a . The call to the Board of Commissioners Meeting shall be delivered to each member
of the Board
commissioners and must be done in writing directly to each-----
members of the Board of Commissioners with adequate receipts, or by letter -----
Recorded or by courier service, or by telex or telefax. -----
- b. In the case of telex or telefax must be reaffirmed by letter -----
written submitted in person or by registered mail as soon as possible -----

- may, at least 5 (five) days before the Meeting be held without -----
takes into account the date of the call and the date of the meeting. -----
6. The Meeting Invitation must include the event, date, time and place of the Meeting.--
 7. The Board of Commissioners Meeting shall be held at the Company's place of residence or
the Company's business activities. -----
 8. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the summons
is not required and the Board of Commissioners Meeting can -----
held anywhere and have the right to make valid decisions and -----
mengikat. -----
 9. The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner; in the case of the Commissioner -----
The main cannot be present or obstructed which does not need to be proven to the----
third party, then the Board of Commissioners Meeting will be chaired by one of the--
Commissioners elected by the members of the Board of Commissioners present and -
or represented at the Board of Commissioners Meeting. -----
 10. A member of the Board of Commissioners may be represented in the Board Meeting
Commissioner only by one other member of the Board of Commissioners based on --
power of attorney. -----
 11. The meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make decisions that
binding only if more than 1/2 (one-half) of the total number of members -----
The Board of Commissioners who are present or represented in the Meeting. -----
 12. Provisions regarding the scheduling of meetings and submission of meeting materials of the Board of Directors
as referred to in Article 19 mutatis mutandis applies to meetings of the -----
Commissioner. -----
 13. The decision of the Board of Commissioners Meeting shall be taken based on deliberation to

consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not -----
is achieved, the decision is taken by voting based on votes -----
Based on the approval of more than 1/2 (one-half) part of the total number of
members

The incumbent Board of Commissioners who attend or are represented at the
meeting.

14. If the votes for and against are balanced, then the proposal is considered rejected.-----

15.a . Each member of the Board of Commissioners present has the right to issue 1
(one)

votes and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of
Commissioners

which he represents;-----

b. Voting on people is carried out by closed ballot-----

without signatures, while voting on other matters -----

is done orally unless the Chairman of the Meeting specifies otherwise without
any

objections based on the majority of votes from those present; -----

c. Blank votes and invalid votes are considered not to be issued in -----

valid and considered non-existent and not counted in determining the number of
the sound produced.

16. Of all matters discussed and decided in the Board of Commissioners Meeting -----

make Meeting Minutes.-----

17. The minutes of the meeting of the Board of Commissioners shall be made by a

person present in the

The meeting is appointed by the Meeting Chair and then must be signed-----

by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners

present at the

Meeting. -----

18. Provisions regarding the results of meetings and minutes of meetings of the Board of

Directors as

referred to in Article 19 mutatis mutandis applies to meetings of the Board of Commissioners.

19. The Board of Commissioners may also take a valid decision without holding a -----
Meeting of the Board of Commissioners, with the provision that all members of the
Board of Commissioners
incumbent gives approval to the proposed proposal -----
in writing and signing the decision.

- 20.A decision taken in such a way has the same strength -----
with decisions taken legally in the Board of Commissioners Meeting. -----

----- **GUIDELINES AND CODE OF ETHICS OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND**

----- **BOARD OF COMMISSIONERS** -----

----- **Article 23** -----

1. The Board of Directors and the Board of Commissioners are obliged to prepare
guidelines that are binding on each
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. ----
2. Guidelines at least include:
- a. Legal basis;
 - b. Description of duties, responsibilities, and authority; -----
 - c. Values;
 - d. Working time; -----
 - e. Meeting policy, including meeting attendance policy and meeting minutes; -----
and -----
 - f. Reporting and accountability.
3. The Company discloses in its annual report that -----
The Board of Directors and/or the Board of Commissioners already have guidelines
that have also been published
on the Company's website. -----
4. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall prepare a code of
ethics that applies to all

members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, and organ support owned by the Company.

5. The code of conduct at least contains:-----
 - a. Principles for carrying out the duties of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees/employees,-----
and/or organ support owned by the Company must be done by -----
good faith, full responsibility, and prudence; and-----
 - b. Provisions regarding the professional attitude of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees/
employees, and/or supporters of organs owned by the Company if there is any---
conflict of interest with the Company.-----
6. The code of ethics is socialized to all employees/employees who work in-----
The Company, which has also been fully published on the Company's website.-----
7. Every member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners is prohibited from taking-----
personal benefits either directly or indirectly from the activities -----
The Company is in addition to legal income.-----

----- **WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND** -----

----- **ANNUAL REPORT** -----

----- **Article 24** -----

1. The Board of Directors submits the Company's Budget Work Plan (RKAP) to the ----
Board of Commissioners for approval, before the financial year begins -----
which at least loads:
 - a. Mission, business objectives, business strategies, company policies detailed
above
each budget for work programs/activities; -----
 - b. Plan for write-off and transfer of the Company's fixed assets; -----
 - c. Detailed company budget for each program budget -----
work/activities;-----

- d. Financial projections of the company and its subsidiaries; -----
 - e. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners; and-----
 - f. Other matters that require the decision or approval of the Board of Commissioners.
2. The work plan as intended in paragraph 1 (one) must be submitted-----
no later than 60 (sixty) days before the end of the financial year. Above -----
work plan, the Board of Commissioners is obliged to research, review, and -----
sign and give consent or endorsement to-----
the Company's Work plan and Budget prepared by the Board of Directors, -----
no later than 30 (thirty) days after the start of the new financial year;-----
The Company's financial year runs from January 1 (one) and ends on- -----
December 31 (thirty-one) of the same year at the end of the month -----
December. -----
3. The Board of Directors prepares an annual report (consisting of balance sheet and
profit calculation
losses of the relevant financial year and other reports) in accordance with the
provisions of the
applicable laws and regulations that have been audited by a Public Accountant-----
registered with the Capital Market Supervisory Agency and signed by the-----
all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
to be submitted to the
and to obtain approval and ratification in the Annual GMS. -----
The Annual Report must have been provided at the Company's office at the time of --
the invitation of the Annual GMS. -----
4. Before signing the Annual Report in paragraph 3 of this Article, the -----
The Commissioner will review and assess the Annual Report and for -----
which needs can be requested for expert assistance at the Company's expense and ----
to whom the Board of Directors is obliged to provide the necessary information. -----
5. The Company is obliged to announce the Annual Report in the form of Balance
Sheet and Report

The Company's Profit and Loss in 2 (two) Indonesian-language daily newspapers that

national circulation and one of them published at the place of-----

The Company as determined by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the

applicable laws and regulations.

----- **USE OF NET PROFIT, INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION** -----

----- **AND DIVIDEND DISTRIBUTION** -----

----- **Article 25** -----

1. The Board of Directors Meeting must submit a proposal to the Annual GMS regarding

use and/or distribution of undivided net profit listed -----

in the balance sheet and profit and loss calculation submitted for approval by the GMS

annual, in which proposal can be stated how much net profit has not been -----

can be set aside for reserves as intended in the-----

Article 25 below and the proposal regarding the amount of dividends that may be ----

are shared, one by one without prejudice to the right of the GMS to -----

decided otherwise.-----

2. Dividends are only paid in accordance with the Company's financial ability-----

when the Company has a positive profit balance Based on the results-----

taken in the GMS in which decision must also be determined at a time, -----

Payment method and form of dividends by paying attention to regulatory provisions -

applicable laws and regulations in the field of Capital Market, as well as the regulations of the Stock Exchange

Securities in the place where the Company's shares are listed. -----

- a. Dividends for shares are paid to people in whose name the shares are-----

recorded in the Register of Shareholders, on the date specified by the -----

The Annual GMS decides on the distribution of dividends.-----

- b. The payment date must be announced by the Board of Directors to the

Shareholders.

c. In the event that the annual GMS does not determine other uses, then the net profit after deducting the provisions required by law and-----

The Articles of Association are divided as dividends. -----

3. Based on the decision of the Board of Directors' meeting, the Board of Directors may distribute temporary dividends

(interim dividends) upon obtaining the approval of the Board of Commissioners and if

The distribution does not cause the Company's net assets to be -----

smaller than the issued and paid-up capital plus mandatory reserves, -----

provided that the interim dividend must be -----

are taken into account with dividends distributed based on the resolution of the GMS

The next year is taken in accordance with the provisions of the Budget -----

This basis is by paying attention to the provisions of laws and regulations that-----

applies in the field of Capital Market as well as the regulations of the Stock

Exchange in the place where the shares -----

The Company's shares were listed. -----

4. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss of-----

cannot be closed with reserve funds, then the loss will still be recorded -----

and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year -----

The Company is considered to have made no profit during the recorded losses and ---

included in the calculation of profit and loss is not at all closed, thus -----

without prejudice to the provisions of the applicable laws.-----

5. By taking into account the Company's revenue in the relevant financial year, -----

from such net profit in the balance sheet and profit and loss calculation -----

approved by the Annual GMS, can be given tantien to members of the Board of Directors and

The Company's Board of Commissioners is determined by the GMS. -----

6. Net profit distributed as dividends not taken within 5 -----

(five) years after it is provided to be paid into the fund-----

a special reserve for that.

- a. Dividends in the special reserve fund can be taken by the Holder -----
Shares entitled before the expiration of a period of 10 (ten) years with -----
submit proof of their right to such dividends that can be received by -----
Board of Directors of the Company.-----
- b. Dividends that are not taken after the expiration of the time become the property
of
Company.-----

----- **USE OF RESERVE FUNDS** -----

----- **Article 26** -----

1. The portion of net profit set aside for reserve funds is determined by -----
GMS after taking into account the proposal of the Board of Directors (if any) and
with
heeding the applicable laws and regulations. -----
2. Reserve funds up to an amount of at least 20% (twenty-----
percent) of the issued capital is only used to cover losses -----
suffered by the Company that cannot be fulfilled by other provisions. -----
3. When the total amount of the proposed funds has exceeded the amount by at least 20%
(two
ten percent) of the issued capital, the GMS can decide -----
so that the amount of the reserve fund exceeds the specified amount-----
in paragraph 2 is used for the Company's needs.-----
4. The Board of Directors must manage the reserve fund so that the reserve fund can
obtain
profits, in a manner deemed good by him with the approval of the Board of
Commissioners
and by paying attention to the applicable laws and regulations. -----
5. Profits received from reserve funds must be included in the calculation -----
the Company's profit and loss.-----

----- **AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION** -----

- **Article 27** -----
1. Amendment of the Articles of Association is determined by the GMS, which is attended by the Holder
Shares representing at least 2/3 (two-thirds) of the total amount -----
shares with valid voting rights issued by the Company and -----
The decision is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the entire share -----
with voting rights present at the GMS.
- The amendment of the Articles of Association must be made by a Notary deed
and
in Indonesian.
 2. Amendment of the provisions of the Articles of Association concerning the change
of name,
place of position, purpose, and purpose, business activities, period of establishment --
The Company, the amount of authorized capital, the reduction of issued and paid-up
capital
and change the status of a closed Company to a public Company or -----
on the contrary, it must obtain approval from the Minister of Law and Human Rights
The people of the Republic of Indonesia. -----
 3. Amendment of the Articles of Association other than those mentioned in the -----
paragraph 2 of this Article is sufficient to notify the Minister of Law and Human
Rights
The people of the Republic of Indonesia. -----
 4. If the GMS referred to in paragraph 1 of the prescribed quorum does not -----
achieved, then the earliest is 10 (ten) days and the latest is 21 (twenty-one) -----
the day after the first GMS, the second GMS can be held on the condition that -----
and the same event as required for the first GMS, except -----
Regarding the duration of the call, it must be made no later than 7 (seven) days -----
before the second GMS, excluding the date of the call and the date of the GMS -----
and for the call of the GMS, there is no need to notify in advance -----
and the second GMS are valid and have the right to make binding decisions -----

if attended by Shareholders representing at least 3/5 (three per-----
five) a portion of the total number of shares with valid voting rights that have been ---
issued by the Company and the decision is approved by more than 1/2 (one-half) -----
part of all shares with voting rights present at the GMS. -----

5. In the event that the quorum of the second GMS is not reached, then upon the
request

The company quorum for the third GMS, the number of votes to take -----
decisions, summons and time of the GMS shall be determined by the Chairman -----
OJK. -----

6. The decision regarding the reduction of capital must be notified in writing -----
to all creditors of the Company and announced by the Board of Directors in 2 (two) --
1 (one) of which has a circulation of
area within the territory of the Republic of Indonesia and 1 (one) other issued -----
at the Company's place of residence as determined by the Board of Directors and in
the
State Gazette no later than 7 (seven) days from the date of the decision on -----
reduction of capital.

----- **CONSOLIDATION, CONSOLIDATION,** -----

----- **TAKEOVERS, AND SEPARATIONS** -----

----- **Article 28** -----

1. By heeding the provisions of the applicable laws and regulations -----
then mergers, mergers, takeovers and separations, can only -----
based on the resolution of the GMS attended by the Shareholders who -----
representing at least 3/4 (three-quarters) of the total number of shares with -----
valid voting rights that have been issued by the Company and the decision is
approved
by more than 3/4 (three-quarters) of all shares with voting rights that -----
present at the GMS. -----

- a. In the event that the quorum as referred to above is not achieved, then in the -----
The second GMS is valid if attended by the Shareholders or -----

his or her legal power of attorney representing at least 2/3 (two-thirds) of the ----
the total number of shares with valid voting rights issued by -----
The Company and approved more than 3/4 (three-quarters) of all shares -----
with voting rights present at the GMS. -----

- b. And in the case of the quorum of the second GMS as referred to above, it is not-
is achieved, then upon the request of the Company, the quorum of attendance,
the number of votes
to make decisions, calls and timing of the GMS -----
then determined by the Chairman of the OJK. -----

2. The Board of Directors is obliged to announce in 2 (two) daily newspapers in
Indonesian

1 (one) of them has wide circulation within the territory of the Republic of-----
Indonesia and 1 (one) other published at the Company's place of residence-----
as determined by the Board of Directors regarding the summary of the merger plan,--
merger and takeover or separation of the Company no later than 30 (three-----
ten) days before the call of the GMS.-----

----- **DISSOLUTION AND LIQUIDATION** -----

----- **Article 29** -----

1. By heeding the provisions of the applicable laws and regulations, -----
then the dissolution of the Company can only be carried out based on the resolution
of the GMS
attended by Shareholders representing at least 3/4 (three-quarters) -----
part of the total number of shares with valid voting rights that have been issued -----
by the Company and the decision is approved by more than 3/4 (three-quarters) of
the
all shares with voting rights present at the GMS. -----
- a. In the event that the quorum as referred to above is not reached, then in the -----
The second GMS is valid if attended by the Shareholders or -----
his or her legal power of attorney representing at least 2/3 (two-thirds) of the ----
the total number of shares with valid voting rights issued by -----

- The Company and approved more than 3/4 (three-quarters) of all shares -----
with voting rights present at the GMS. -----
- b. In the event that the quorum in the second GMS as referred to above is not-----
is cut off, then upon the Company's request, the quorum, the number of votes
for
make decisions, summons and time to hold the next GMS -----
determined by the Chairman of the OJK. -----
2. If the Company is dissolved, either due to the expiration of the period of
establishment
(if established for a certain period of time) or dissolved by decision -----
GMS or because it is declared dissolved based on a court determination, then -----
The company must be liquidated by one or more liquidators. -----
3. The Board of Directors acts as a liquidator if in the resolution of the GMS or the
determination of the
As referred to in paragraph 2, it does not appoint a liquidator. -----
4. Regulations regarding appointments, temporary dismissals, dismissals, -----
authority, obligations, responsibilities and supervision of the Board of Directors
apply
also for liquidators.-----
5. Wages for liquidators are determined by the GMS or the Court's determination. -----
6. Liquidators must be liquidated within 30 (thirty) days from the date the Company is
dissolved:
- a. Notify all creditors of the dissolution of the Company -----
in accordance with the provisions of the applicable law by announcing-----
dissolution of the Company in 2 (two) Indonesian-language daily newspapers, 1
(one) of which has a wide circulation within the territory of the Republic of-----
Indonesia and 1 (one) other publication at the Company's domicile -----
as determined by the Liquidator and the State Gazette of the Republic of
Indonesia;
- b. Notify the dissolution of the Company to the Minister to be recorded in the -----

- the Company's list that the Company is in liquidation;-----
- c. Notify the Chairman of the OJK of the dissolution of the Company in accordance with
with applicable laws and regulations.-----
- 7.a . The liquidator must be responsible to the GMS for the liquidation carried out;-----
- b. The remaining wealth after liquidation must be distributed to the Shareholders --
and each Shareholder is entitled to receive a share proportional to the value of the
the
nominal of fully paid shares owned by him; -----
- c. The liquidator must register and announce the final result of the liquidation process
in accordance with applicable laws and regulations. -----
8. Articles of Association as stipulated in the deed of establishment along with-----
the amendment shall remain valid until the date of its ratification -----
calculation of liquidation by the GMS and the granting of repayment and exemption -
completely to the liquidators.

----- **CLOSING RULES** -----

----- **Article 30** -----

1. Everything that is not or has not been adequately regulated in this Articles of Association, then
The GMS will decide.
2. Everything that is not or has not been adequately regulated in this Articles of Association is mandatory
heeding the provisions of laws and regulations in the Capital Market Sector and -----
The Law on Limited Liability Companies or will be decided based on -----
decisions of the Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting,
and/or GMS that are not
contrary to the provisions of laws and regulations in the field of Market -----
Capital and Laws on Limited Liability Companies. -----

-In connection with the approval of the Meeting mentioned above and based on the

Register of Shareholders as of 30-04-2024 (thirty April 2024), the composition of shareholders at the end of the Articles of Association reads as follows:

1. Determine the composition of the Company's shareholders, taking into account the shares----

The Company has been fully listed on the Capital Market, which is as follows:-----

that the issued capital as referred to in Article 4 paragraph 2 has been taken and fully paid up by the Shareholders, namely:-----

- PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk amounting to 5,229,279,960 (five billion two hundred and twenty-nine million two hundred and seventy-nine thousand nine hundred and sixty) shares with a total nominal value of Rp522,927,996,000 (five hundred and twenty-two billion nine hundred and twenty-seven million nine hundred and ninety-six thousand Rupiah); and-----
- The public as many as 3,486,186,640 (three billion four hundred and eighty-six million one hundred and eighty-six thousand six hundred and forty) shares, with a total nominal value of Rp348,618,664,000 (three hundred and forty-eight billion six hundred eighteen million six hundred and sixty-four thousand Rupiah);-----

so that the total amount is 8,715,466,600 (eight billion seven hundred and fifteen million four hundred and sixty six thousand six hundred) shares or with a nominal value of Rp871,546,660,000 (eight hundred and seventy one billion five hundred and forty six million six hundred and sixty thousand Rupiah)

-The Witness hereby certifies the correctness of the identity, and/or the original----- signature of the Witness whose name is in this deed and all documents--- which is the basis for the making of this deed without any exceptions being submitted----- to me, the Notary of his identity in accordance with the identity card submitted to me, the Notary, and the Witness has affixed the fingerprint of the right thumb on----- the attachment made separately, However, it is a unit and part that--- is inseparable from this Deed and the Applicant is fully responsible----- for such matters and further declares that he has

known, understood, understood- and agreed to the entire content and intent of this Deed.
If in the future a dispute arises over such matters in any form or for any reason, then the
plaintiff---- agrees and hereby releases me, the Notary and the witnesses who signed this
deed from all claims or charges from any party in respect thereof.-

-The Witness has been known by me, the Notary of the identity conveyed to the -----
I'm a Notary.-----

From all of the above, it is made:

----- A K T A I N I -----

-Made as minuta and read and signed in Jakarta, on the day and-----
such date at the beginning of this deed, attended by:-----

1. -Mrs. INDAH FATMAWATI, Bachelor of Law, born in Jakarta, on -----
28-07-1959 (twenty-eighth July year one thousand nine hundred and fifty -----
nine), Indonesian citizen, residing in South Jakarta, Tebet-----
East in VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Tebet Village -----
East, Tebet District.

-Population Identification Number Holder: 3174016807590001.-----

2. -Mrs. MIRA K DARIUS, according to her description, is called MIRA
KUSDARMINI-----

DARIUS, born in Jakarta, on 17-10-1962 (seventeen October year one thousand
nine hundred and sixty-two), Indonesian citizen, residing in Central Jakarta, Jalan
Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, East Cempaka Putih
Village, Cempaka Putih District.-----

-Population Identification Number Holder: 3171055710620002.-----

Both are Assistant Notaries, as witnesses.

As soon as this deed is read by me, the Notary to the witnesses and witnesses, -----
so this deed is immediately signed by the witnesses and me,----- the Notary.-----
